

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**UNIK LESTARI
NIM. 1717201044**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Unik Lestari
NIM : 1717201044
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan
Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan
Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 11 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Unik Lestari

NIM. 1717201044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

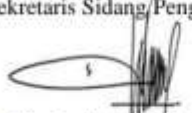
**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTARWILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**

Yang disusun oleh Saudari **Unik Lestari NIM 1717201044** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Shofiyulloh, M.H.I
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji


Mahardika Cipta Raharja, M.Si
NIDN. 2010028901

Purwokerto, 23 Juli 2021

Mengesahkan

Dekan




Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saudara Unik Lestari, NIM. 1717201044 yang berjudul:

**Analisis Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap
Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017-2019**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 11 Juni 2021

Pembimbing,



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.

NIDN. 2010028901

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTARWILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017-2019**

Oleh: Unik Lestari
NIM. 1717201044
Email: unikles17@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini disebabkan karena adanya ketidakmerataan dalam aspek penunjang pembangunan ekonomi antara lain pada realisasi investasi yang tidak merata serta indeks pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah diukur dengan Indeks Williamson. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa *cross section* 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah serta data *time series* selama periode 2017-2019. Data diolah dengan analisis data panel dengan model regresi *Fixed Effect Model*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, *Fixed Effect Model*.

IAIN PURWOKERTO

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INVESTMENT AND HUMAN
DEVELOPMENT INDEX ON DEVELOPMENT INEQUALITY
BETWEEN REGENCY/CITY REGIONS IN CENTRAL JAVA PROVINCE
2017-2019**

UNIK LESTARI

NIM. 1717201044

E-mail: unikles17@gmail.com

Study Program of Islamic Economic, Islamic Economic and Business Faculty
The State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Inequality of development between regions is a common aspect in the economic activities of a region. This inequality is caused by inequality in the aspects of supporting economic development, among others, in the uneven realization of investment and the different human development index in each region. Inequality of development between regions is measured by the Williamson Index. This study aims to determine the effect of investment and human development index on development inequality between districts/cities in Central Java Province in 2017-2019.

This research is a quantitative research. The data used is a cross section of 29 districts and 6 cities in Central Java Province as well as time series data for the 2017-2019 periods. The data is processed by panel data analysis with Fixed Effect Model regression model.

The results of this study indicate that the investment variable has no significant and positive effect on development inequality between regions, and the human development index variable has a significant and negative effect on development inequality between regions.

Keywords: *Inequality Development Between Regions, Investment, Human Development Index, Fixed Effect Model.*

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain”

H.R Bukhori

“Start where you are. Use what you have. Do what you can”

Arthur Ashe



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kakak, serta keluarga. Terimakasih atas doa - doa yang setiap hari kalian panjatkan serta dorongan dan semangat kalian untuk saya. Semoga pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk anak-anak tersayang diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'â</i>
----------------	---------	----------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawí al-furúḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala kuasa dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019”. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna, karena keterbatasan penulis dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan. Skripsi ini tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, saran, dan motivasi. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, arahan secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak, Aamiin.
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu serta seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu, kakak, serta keluarga yang menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, doa serta motivasi kepada penulis.

7. Para sahabat penulis Setrining Haryanti, Kamelia Sari, Maylia Azhari, Utari Noor Wijayanti, Apriliani Saputri, Tita Anjarningsih, Fika Puspitasari yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar BPH FoSSEI Regional Jawa Tengah Periode 2019/2020. Terima kasih telah berproses bersama dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. *Jazakallah Khairan Katsiran.*
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang tak henti-hentinya, sebagai balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Purwokerto, 1 Juni 2021



Unik Lestari
NIM. 1717201044

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	16
1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah	16
2. Indeks Williamson.....	25
3. Investasi.....	26
4. Indeks Pembangunan Manusia.....	29
5. Ketimpangan Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Islam	32
C. Kerangka Berpikir.....	35
D. Hipotesis	36

E. Landasan Teologis	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40
D. Populasi dan Sampel Penelitian	41
E. Variabel dan Indikator Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknis Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
1. Profil Provinsi Jawa Tengah	50
2. Kondisi Penduduk Provinsi Jawa Tengah	51
3. Analisis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	51
B. Hasil Analisis Data	53
1. Analisis Deskripsi Data Penelitian	53
2. Hasil dan Pembahasan Analisa	58
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
1. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	65
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	69
3. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Perspektif Ekonomi Islam	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Indikator Variabel
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
Tabel 4.2	Hasil Uji Chow
Tabel 4.3	Hasil Uji Hausman
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.6	Hasil Uji t Statistik
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.8	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- Grafik 1.2 Perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- Grafik 1.3 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- Grafik 4.1 Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- Grafik 4.2 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- Grafik 4.3 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- Grafik 4.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Kuznet
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir
Gambar 4.1	Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Estimasi Data Panel
- A. *Common Effect Model*
 - B. *Fixed Effect Model*
 - C. *Random Effect Model*
 - D. Uji Chow
 - E. Uji Hausman
- Lampiran 2 Hasil Uji Asumsi Klasik
- A. Uji Normalitas
 - B. Uji Multikolinearitas
 - C. Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 3 Data Penelitian
- Lampiran 4 Indeks Williamson
- Lampiran 5 Realisasi Investasi
- A. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
 - B. Realisasi Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 6 Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan yang dimiliki oleh setiap negara, begitu juga dengan Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga tersedianya infrastruktur yang lebih baik, taraf pendidikan semakin baik, perusahaan yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin berkembang (Sukirno, 2007: 3).

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan dengan pembangunan daerah. Hasil pembangunan dari setiap daerah tentunya berbeda, hal ini terjadi karena perbedaan faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pembangunan daerah yaitu adanya perbedaan potensi daerah, keterlibatan *stakeholder* (masyarakat, pengusaha domestik, dan investor), perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan sisi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi daerah (Banendro, 2016).

Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Hal tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah. Munculnya ketimpangan dalam pembangunan wilayah adalah fenomena yang harus dihadapi oleh setiap negara mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan global (Maryati, dkk., 2019). Ketidakmerataan menyebabkan terhambatnya produktivitas pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab ketimpangan antar daerah di Indonesia antara lain adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah, perbedaan sumber daya alam (SDA), perbedaan kondisi geografis antarwilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi karena kurang memadainya infrastruktur (Tambunan, 2004).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum dan sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah dan alokasi dana pembangunan antarwilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidak heran apabila terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2008: 104). Mencapai pertumbuhan yang adil dan seimbang adalah penting bagi masyarakat dan pemerintah. Meningkatnya ketimpangan menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan ekonomi, yang pada gilirannya akan merusak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Ravinthirakumaran, 2021).

Dalam ekonomi Islam dibahas juga konsep pembangunan syari'ah yang diartikan sebagai konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Beik, 2016). Pembangunan ekonomi di suatu wilayah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqashid syari'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat (Gultom & Tini, 2020).

Pandangan ekonomi Islam mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian harus menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan dengan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan ekonomi umat (Aprianto, 2016). Salah satu bentuk ketidakadilan dalam ekonomi adalah terjadinya ketimpangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya mengatasi ketimpangan adalah dengan pendistribusian harta yang berkeadilan (Huda, 2017). Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Al-Quran surat *Al Hasyr* ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa sebaiknya harta benda jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia atau kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli. Karena Islam menetapkan bahwa harta itu memiliki fungsi sosial (Shihab, 2002: 111).

Pusat pembangunan Indonesia dan berjalannya roda perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa. Salah satu daerah yang potensial dalam pertumbuhan ekonomi adalah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai pencapaian telah dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah terutama dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mulai terlihat dengan adanya beberapa pengembangan potensi daerah. Pembangunan ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat sering menjadi ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi (Sukirno, 2006).

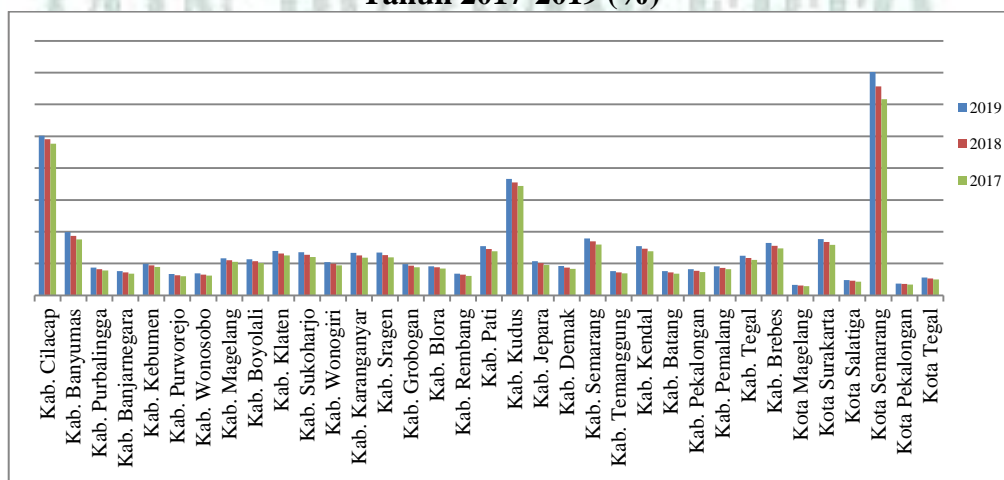
Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (%)

Provinsi	2017	2018	2019	Rata-Rata
DKI Jakarta	6,20	6,17	5,89	6,09
DI Yogyakarta	5,26	6,20	6,60	6,02
Banten	5,75	5,82	5,53	5,70
Jawa Timur	5,46	5,50	5,52	5,49
Jawa Barat	5,33	5,66	5,07	5,35
Jawa Tengah	5,26	5,31	5,41	5,33

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2020

Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2019 yakni sebesar 5,33%. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bisa dikatakan dalam kondisi stabil namun masih tergolong rendah. Hal tersebut menunjukkan adanya pembangunan ekonomi yang cukup baik. Namun biasanya dengan kondisi perekonomian yang cukup baik tersebut tidak membuat pembangunan tiap kabupaten/kota lebih merata. Indikasi adanya potensi ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat dari grafik berikut.

Grafik 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019 (%)

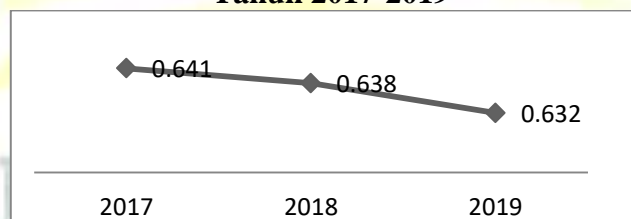


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat nilai PDRB ADHK tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang mana menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2019. Hal ini terlihat dari nilai PDRB tertinggi yaitu Kota Semarang. Sedangkan PDRB terendah yaitu Kota Magelang. Nilai tersebut menunjukkan masih belum meratanya pembangunan ekonomi antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah ini terdiri atas 35 kabupaten/kota memiliki latar belakang perbedaan antarwilayah. Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan wilayah. Hasil dari otonomi daerah ternyata tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan karena ada beberapa daerah yang tidak mampu mengelola sumber dayanya dengan optimal. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin tidak merata serta mengakibatkan peningkatan ketimpangan pembangunan (Soeharjoto, 2019). Indikasi dari adanya ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah adalah Indeks Williamson yang masih tinggi.

Grafik 1.2
Perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019



Sumber: Data BPS (diolah)

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rata-rata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi antarwilayah di daerah tersebut (Sjafrizal, 2008: 107). Grafik 1.2 menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi karena mendekati angka satu. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah di Jawa Tengah selama tahun 2017-2019 terus menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, kesenjangan atau ketimpangan wilayah merupakan salah satu isu strategis yang saat ini masih harus ditangani. Masih cukup banyak kabupaten/kota yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Hal tersebut terlihat dengan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang ada.

Perbedaan kondisi demografis atau sumber daya manusia di suatu daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang mengukur mengenai taraf hidup masyarakat. IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian, karena pembangunan sumber daya manusia yang baik dapat memaksimalkan faktor-faktor produksi yang ada dalam suatu daerah (Sukirno, 2006).

Menurut Tambunan dalam Islami (2018) tinggi rendahnya IPM akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Namun permasalahannya adalah IPM di setiap daerah berbeda-beda, sehingga menjadikan IPM sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM yang tidak merata akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong ketidakseimbangan pada pembangunan. Apabila terus dibiarkan maka ketimpangan yang terjadi akan semakin melebar.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pemerataan IPM di Pulau Jawa terdapat perbedaan antar provinsi di wilayah ini. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan rata-rata IPM sebesar 80.43 diikuti DI Yogyakarta sebesar 79.47, kemudian Provinsi Banten sebesar 71.93, Provinsi Jawa Barat sebesar 71.34, Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.12 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 70.84. Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu untuk mengukur ketimpangan pembangunan wilayah.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2017-2019

No.	Provinsi	Tahun			Rata-Rata
		2017	2018	2019	
1.	DKI Jakarta	80.06	80.47	80.76	80.43
2.	Jawa Barat	70.69	71.30	72.03	71.34
3.	Jawa Tengah	70.52	71.12	71.73	71.12
4.	DI Yogyakarta	78.89	79.53	79.99	79,47
5.	Jawa Timur	70.27	70.77	71.50	70,84
6.	Banten	71.42	71.95	72.44	71.93

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2020

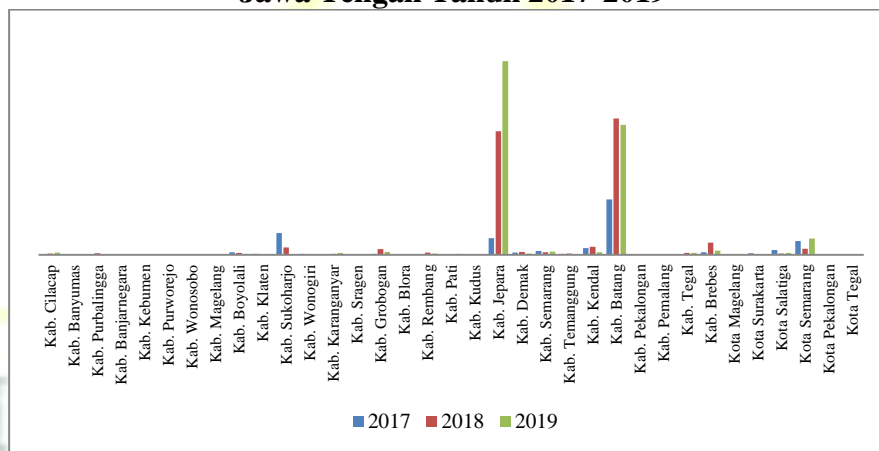
Selain dilihat dari IPM tersebut, indikasi lain dari adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah adalah persebaran investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, akan dapat juga mendorong proses pembangunan melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi (Sjafrizal, 2008: 120).

Dalam pembangunan wilayah, investasi penting untuk meningkatkan ketersediaan cadangan modal. Adanya keterlibatan *stakeholder* yang dapat menciptakan kondisi iklim investasi yang kondusif akan mengundang investor dan hal ini membawa dampak baik bagi pembangunan di daerah. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pembangunan wilayah baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini terjadi karena sebagian investasi swasta hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi yang dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Investasi akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, namun investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan (Angelia, 2010).

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan investasi di Indonesia. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Tengah salah satunya adalah ketidakmerataan pertumbuhan investasi atau kurangnya pemerataan penyebaran realisasi PMA dan PMDN. Beberapa kabupaten/kota memiliki minat investasi yang begitu tinggi, namun beberapa kabupaten/kota mengalami investasi yang stagnan dan cenderung sangat rendah. Kondisi ini memicu terjadinya ketimpangan wilayah. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi PMA di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada grafik berikut.

Grafik 1.3
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.3 realisasi PMA kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun dari 2017-2019 terlihat kurang merata. Terdapat jarak yang cukup tinggi antara investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, masih terdapat kabupaten/kota dengan realisasi investasi sangat rendah bahkan tidak ada investasi yang masuk. Investasi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Jepara, sedangkan Kabupaten Kebumen dengan realisasi PMA nol.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pengujian dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang telah dianalisis oleh Didia (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian Wahyuntari (2016) yang menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kiton (2019) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan.

Pembangunan dalam lingkup wilayah memang tidak selalu merata. Sampai saat ini ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu permasalahan yang serius. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh ketidakmerataan dan kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Sumber daya tersebut diantaranya sumber daya modal berupa investasi dan sumber daya manusia berupa IPM. Kajian ketimpangan penting untuk dilakukan mengingat ketimpangan merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Serta dalam hal ini perlu adanya penelitian mendalam tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, serta diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta pengembangan teori pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pemerintah serta bahan pertimbangan dalam merancang atau menentukan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang berfungsi sebagai acuan penelitian untuk memudahkan bagi peneliti mengaplikasikan penelitiannya (Sugiyono, 2016). Terdapat beberapa studi empiris terdahulu yang berkaitan dengan variabel dan metode yang sesuai.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kiton (2019) yang membahas tentang analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan hasil penelitian perhitungan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2006-2015. Hasil penelitian untuk hubungan variabel bebas pada ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan, angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan, dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dari hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi dapat mempengaruhi ketimpangan sebesar 87.15 persen, sedangkan 12.85 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kurniawan dan Sugiyanto (2013) mengenai ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010 dengan variabel independen pertumbuhan ekonomi, share sektor industri dan pertanian, serta tingkat jumlah orang yang bekerja. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2002-2010 yang diukur menggunakan Indeks Williamson. Selain itu, Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-terbalik terbukti untuk Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap pertumbuhan awal, ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah cenderung

meningkat. Namun kemudian, indeks ketimpangan ekonomi Williamson menunjukkan penurunan nilai seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan variabel sektor pertanian dan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Variabel pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan, dan tingkat lapangan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wahyuntari dan Pujianti (2016) mengenai disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Tipologi Klassen dan analisis regresi data panel dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasil identifikasi kabupaten/kota yang konsisten berada di klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh dalam kurun waktu tahun 2009-2013, yaitu Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat dan cepat tumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Andhiani, dkk (2018) mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. Melalui alat analisis Indeks Williamson, dapat diketahui pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera selama periode 2011-2015 berada pada angka rata-rata V_w 0,406-0,446 dimana cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. Namun demikian, secara parsial hanya variabel investasi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Sebaliknya variabel-variabel lainnya yaitu belanja pemerintah, dan aglomerasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Didia (2016) mengenai analisis ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Hasil penelitian menunjukkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur serta telah terjadi konvergensi di Kawasan Kedungsepur.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Islami (2018) yang membahas faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tren ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001-2015 diamati melalui perhitungan Indeks Williamson terlihat bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Timur mengalami fluktuasi dan cenderung tinggi karena besarnya nilai yang sangat tinggi yaitu mendekati angka 1 dan bahkan ada yang nilainya justru melebihi angka 1. Hasil analisis dalam penelitian ini ada tiga variabel yang hasilnya signifikan dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu investasi, angkatan kerja dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Arsita (2019) mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, aglomerasi, dan belanja pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2013-2017. Hasil analisis menunjukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah, IPM dan belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan, serta aglomerasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Secara bersama-sama, variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, aglomerasi, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2013-2017.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mario A Kiton (2019), " <i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara</i> "	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan, angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan, dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan, dan aglomerasi dapat mempengaruhi ketimpangan sebesar 87.15%, sedangkan 12.85% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model.	Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian yang berbeda serta variabel independen yang berbeda
2	Benedictus Adi Kurniawan, dkk. (2013), " <i>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010</i> "	Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2002-2010 yang diukur menggunakan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel share sektor pertanian dan share sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah, dan tingkat jumlah orang yang bekerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.	Perbedaan penelitian terdapat pada variabel independen yang berbeda

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3	Linda Wahyuntari dan Amin Pujiati (2016), <i>“Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat dan cepat tumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.	Perbedaan penelitian terdapat pada metode pengukuran ketimpangan wilayah serta variabel independen yang berbeda.
4	Kartira D. Andhiani, dkk (2018), <i>“Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera”</i>	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. Namun demikian, secara parsial hanya variabel investasi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Sebaliknya variabel-variabel lainnya yaitu belanja pemerintah, dan aglomerasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan.	Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian yang berbeda serta metode pengukuran ketimpangan wilayah yang berbeda
5	Khoir Akfina Didia (2016), <i>“Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur”</i>	Hasil penelitian yaitu investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur.	Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian yang berbeda
6	Fitrah Sari Islami (2018), <i>“Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia”</i>	Hasil analisis penelitian ini terdapat tiga variabel yang hasilnya signifikan dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu investasi, angkatan kerja dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah.	Perbedaan penelitian terdapat pada variabel tempat penelitian

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
7	Ayu Arsita (2019), “ <i>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Aglomerasi, dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017</i> ”	Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia dan belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan, serta aglomerasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Secara simultan, variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, aglomerasi, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017.	Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian yang berbeda serta metode pengukuran ketimpangan wilayah yang berbeda yaitu dengan konsep PDRB Per Kapita Relatif dan Tipologi Klassen

B. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi dalam penelitian. Inti dari kerangka teori adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan dengan konteks peristiwa yang dipelajari atau masalah dalam penelitian (Juliyanayah, 2011).

1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan ketidakmerataan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan masalah umum yang sering terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang ada pada masing-masing wilayah. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antarwilayah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan,

sehingga terbentuk wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan pembangunan tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah (Sjafrizal, 2008: 104).

Ketimpangan atau disebut juga dengan disparitas merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari proses pembangunan. Perbedaan dari masing-masing daerah menjadikan setiap daerah memiliki cara dan kebijakan sendiri dalam memajukan perekonomian daerahnya, sehingga ketimpangan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah dengan mengatur pembangunan. Namun, pembangunan belum tentu untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan konsep pemerataan pembangunan di Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pengangguran (Suryanto, 2018).

Menurut Mubyarto ketimpangan dibedakan menjadi tiga, antara lain (Islami, 2018):

- a. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian.
- b. Ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki.
- c. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat. Ketimpangan ini sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis.

Permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik yang dikenal dengan Hipotesa Neo-Klasik. Dalam teori tersebut menjelaskan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2008: 105).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, jika proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun. Berdasarkan hipotesa tersebut, dapat disimpulkan negara-negara yang sedang berkembang akan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi sementara pada negara maju ketimpangan akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal, 2008: 105).

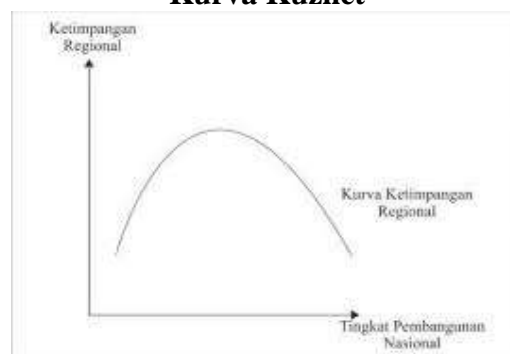
Saat proses pembangunan baru mulai di negara berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah dengan kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan, daerah yang terbelakang belum mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial budaya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisi lebih baik, sedangkan daerah terbelakang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat (Sjafrizal, 2008: 106).

Ekonom lain juga menguji Hipotesa Neo-klasik. Jeffrey G. Williamson menguji studi tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan berkembang melalui uji data *time series* maupun *cross-section*. Hasil penelitian menunjukkan Hipotesa Neo-Klasik memiliki formulasi secara teoritis maupun bukti secara empirik. Hal tersebut berarti setiap awal proses pembangunan tidak selamanya mengurangi tingkat ketimpangan yang ada melainkan pada tahap permulaan justru menciptakan ketimpangan (Sjafrizal, 2008: 106).

Neo-Klasik juga berpendapat bahwa mobilitas faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Sehingga, modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar. Namun, bila proses pembangunan terus berlanjut,

dengan semakin baik sarana dan prasarana, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Sehingga, setelah negara tersebut sudah maju, maka ketimpangan regional secara bertahap akan berkurang. Dengan demikian, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik (*reverse U-Shape curve*) (Sjafrizal, 2008: 97).

Gambar 2.1
Kurva Kuznet



Sumber: Sjafrizal, 2008

Hipotesa Neo-Klasik ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Awal proses pembangunan, ketimpangan memburuk dan pada tahap berikutnya ketimpangan menurun. Namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali (Sutarno & Kuncoro, 2003).

Teori lain mengenai ketimpangan pembangunan wilayah yaitu teori *Backwash-Spread Effect* (Myrdal). Dalam teori tersebut Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses yang menyebabkan daerah maju semakin maju, sementara daerah tertinggal semakin terbelakang. Myrdal menggunakan istilah dampak balik (*backwash effect*) dan dampak menyebar (*spread effect*). Hasil analisisnya yaitu *backwash effect* cenderung membesar dan *spread effect* cenderung mengecil hal tersebut yang menyebabkan ketimpangan regional antarwilayah (Jhingan, 2010).

Menurut Myrdal, dampak balik merupakan perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena faktor-faktor eksternal yaitu dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan. Sementara, dampak sebar merupakan suatu proses pembangunan yang menyebar dari pusat pembangunan ekonomi ke wilayah lainnya. Penyebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar. Myrdal menyarankan untuk membuat kebijakan yang melemahkan dampak balik dan memperkuat dampak penyebaran, agar semakin memperkecil ketimpangan regional (Jhingan, 2010).

Terdapat beberapa cara dalam menentukan tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah, antara lain:

a. Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pembangunan antarwilayah yang awalnya dilakukan adalah *Williamson Index* yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Dengan demikian, secara statistik formulasi Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2008: 108):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}, \quad 0 < V_w < 1$$

dimana :

V_w : Indeks Williamson

f_i : Jumlah penduduk daerah i

- n : Jumlah penduduk seluruh daerah
 y_i : PDRB perkapita daerah i
 \bar{y} : PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

subskrip w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati 0 berarti sangat merata (Sjafrizal, 2008: 108).

b. Indeks Entropi Theil

Indeks lain yang biasa digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah *Theil Index* sebagaimana digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah sama dengan data untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB perkapita setiap wilayah dan jumlah penduduk. Dalam penafsiran juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Dengan demikian formulasi *Theil Index* (T_d) adalah (Sjafrizal, 2008: 109):

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log \left[\frac{\left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\}}{\left\{ \frac{n_{ij}}{N} \right\}} \right]$$

dimana:

- T_d : *Theil Index*
 y_{ij} : PDRB perkapita kabupaten i di provinsi j
 Y : Jumlah PDRB perkapita seluruh provinsi j
 n : Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j
 N : Jumlah penduduk seluruh kabupaten

Namun demikian, penggunaan Indeks Theil sebagai ukuran ketimpangan mempunyai beberapa kelebihan. *Pertama*, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisisnya lebih luas. *Kedua*,

dengan indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing wilayah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting (Sjafrizal, 2008: 109).

Ketimpangan antarwilayah pada umumnya terjadi karena perbedaan *endowment factor* yang dimiliki masing-masing daerah, yakni faktor demografi dan faktor kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan antarwilayah, antara lain (Sjafrizal, 2008: 117):

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah adanya perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lambat (Sjafrizal, 2008: 117).

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya yang mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud

adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, apabila suatu daerah dengan kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal, 2008: 118).

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat juga mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang didukung pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antarwilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya (Sjafrizal, 2008: 119).

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh pertama, karena adanya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi di mana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik (Sjafrizal, 2008: 119).

e. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Seluruh sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut (Sjafrizal, 2008: 120). Alokasi dana pembangunan ini tentunya sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

2. Indeks Williamson

Indeks Williamson atau *Williamson Index* merupakan ukuran ketimpangan pembangunan wilayah yang pertama kali ditemukan dan digunakan pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, formula ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan. Teori ini dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson yang pada mulanya menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun indeks ini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2008: 108).

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah, bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Berbeda dengan *Gini Ratio* yang biasanya digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Dengan demikian, secara statistik formulasi Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2008: 108):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}, \quad 0 < V_w < 1$$

dimana :

V_w : Indeks Williamson

f_i : Jumlah penduduk daerah i

n : Jumlah penduduk seluruh daerah

y_i : PDRB perkapita daerah i

\bar{y} : PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

subskrip w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati 0 berarti sangat merata (Sjafrizal, 2008: 108).

Untuk mengetahui besarnya ketimpangan yang terjadi maka diperlukan tingkat ketimpangan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson sebagai berikut:

- a. Bila $V_w < 0,3$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah rendah
- b. Bila $V_w = 0,3 - 0,4$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah sedang
- c. Bila $V_w > 0,4$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah tinggi.

3. Investasi

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang (Sunariyah, 2006). Investasi adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Investasi juga mempunyai peranan penting dalam permintaan agregat. Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Kebijakan alokasi investasi regional menjadi penting bila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan (Sjafrizal, 2008). Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Sedangkan, investasi yang dimaksudkan disini dapat berbentuk investasi swasta, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMA), maupun investasi pemerintah yang disalurkan melalui anggaran pembangunan nasional dan daerah (Sjafrizal, 2014).

Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal itu diinvestasikan hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Investasi akan mendorong perkembangan teknologi. Hal ini berperan penting terhadap kenaikan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Menurut Sukirno dalam Kiton (2019), adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada nantinya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian (Salim dan Budi, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tujuan investasi (penanaman modal) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori Investasi Harrod-Domar, pembentukan investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan investasi tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod Domar, pembentukan investasi tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Menurut teori Harrod-Domar, untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal (Arsyad, 1997).

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menjelaskan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi dalam suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Apabila investasi terpusat di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan.

Teori Myrdal mendefinisikan dampak balik (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu wilayah, karena sebab-sebab di luar wilayah itu. Myrdal

memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar. Investasi merupakan salah satu faktor yang meningkatkan dampak sebar, dengan demikian akan berdampak pada ketimpangan yang terjadi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain (Jhingan, 2010).

Investasi yang selalu digunakan dalam analisis ekonomi adalah investasi yang dilakukan perusahaan, karena jenis investasi ini merupakan komponen terbesar dalam suatu negara dan tentu perannya sangat besar terhadap perekonomian negara (Murni, 2006). Peranan investasi dalam suatu perekonomian yaitu:

- a. Mampu meningkatkan pengeluaran agregat. Apabila terjadi kenaikan investasi, akan meningkatkan permintaan/pengeluaran agregat dan sekaligus akan diikuti oleh penambahan kesempatan kerja yang akhirnya meningkatkan pendapatan nasional.
- b. Investasi dalam bentuk penambahan barang modal akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan akan mendorong pertumbuhan produk nasional dan kesempatan kerja.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses dalam pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi, baik secara kualitas maupun kuantitas adalah sumber daya manusia. Karena dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia secara merata di seluruh wilayah di Indonesia (Banendro, 2016). Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan penduduk yang dapat ditumbuh kembangkan melalui pemberdayaan (UNDP, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Anggraini, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. UNDP menciptakan IPM untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, sehingga bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*).

Dimensi dasar tersebut, dibentuk oleh beberapa variabel yaitu :

1. Dimensi kesehatan dinilai oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir. AHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau usia harapan hidup saat lahir.
2. Dimensi pendidikan atau pengetahuan dinilai dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam pendidikan formal dan perhitungan rata-rata lama sekolah adalah orang dewasa yang berusia 25 tahun atau lebih. Kemudian, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan perhitungan HLS adalah penduduk berusia 7 tahun ke atas.

3. Dimensi standar hidup layak dinilai dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Dimensi Kesehatan} : I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan: } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} - I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran: } I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

BPS (2015) mengelompokan IPM ke dalam empat kategori untuk melihat pencapaian IPM antar wilayah. Adapun kategori tersebut antara lain:

1. IPM rendah jika nilai IPM < 60
2. IPM sedang jika nilai $60 \leq \text{IPM} < 70$
3. IPM tinggi jika nilai $70 \leq \text{IPM} < 80$
4. IPM sangat tinggi jika nilai IPM ≥ 80

Menurut UNDP (2018), Indeks Pembangunan Manusia hanyalah indikator yang menyederhanakan dan menggambarkan sebagian dari apa yang dibutuhkan pada pembangunan manusia. Namun, hal ini tidak mencerminkan ketidaksetaraan, kemiskinan, keamanan manusia, pemberdayaan dan lainnya. Ada indeks komposit lainnya untuk menggambarkan hal-hal tersebut.

IPM sebagai indeks yang dapat menggambarkan kondisi serta kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, serta IPM merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan IPM juga digunakan sebagai salah satu alokasi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Badan Pusat Statistik, 2021).

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. IPM dan ketimpangan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Menurut Becker dalam Noto (2016) menyebutkan teori *human capital* bahwa manusia bukan hanya sebagai sumber daya namun modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. IPM ini berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Kajian yang lebih dalam mengenai peran pendidikan formal sebagai salah satu dimensi IPM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dengan hasil semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

5. Ketimpangan Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab mencakup segala aspek kehidupan baik aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan berkembang pesatnya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang

dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Mustafa Nasution menjelaskan berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis saat ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara (Beik, 2016).

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Munthe, 2014). Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi wilayah. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga segi spiritual dan moral. Oleh karena itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi (Huda, 2015).

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila PDB riil negara meningkat (Huda, 2015: 8). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan distribusi yang adil dan merata akan menyebabkan ketimpangan. Adanya ketimpangan ekonomi akan menimbulkan masalah-masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, maupun kemampuan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, ketimpangan merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi (Aprianto, 2016).

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. *Pertama*, kekayaan tidak boleh

dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. *Kedua*, hasil-hasil produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas wajar apalagi dengan cara yang tidak benar (Aprianto, 2016).

Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan Allah SWT dalam Al-Quran surat *Al-Hasyr* ayat 7 agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakatpun terpenuhi (Rahmawaty, 2013). Telaah terhadap ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan (Khan, 2005). Ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran dalam masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakatnya. Peran kedua institusi tersebut sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja (Aprianto, 2016).

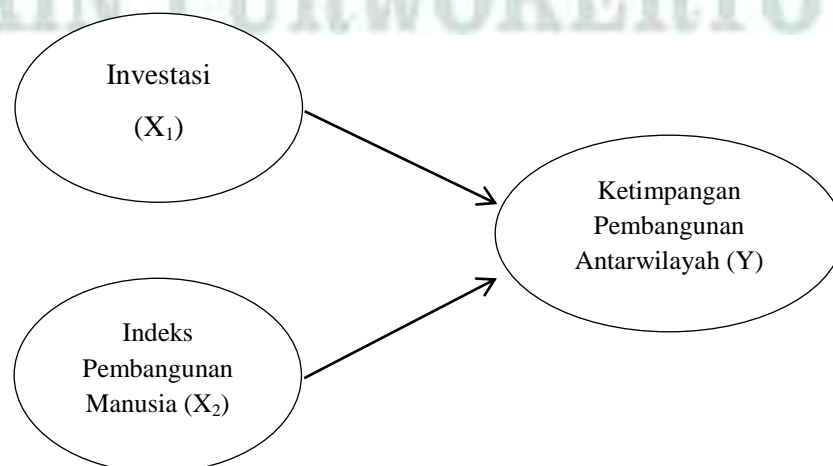
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian merupakan gambaran arah penelitian, dan dibuat untuk mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang tersusun adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu investasi dan IPM. Variabel tersebut termasuk variabel independen dan bersama dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai variabel dependen akan diukur dengan alat regresi untuk memperoleh tingkat signifikansinya.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan ketimpangan antarwilayah merupakan dampak adanya pembangunan yang tidak merata. Adanya kualitas hidup manusia yang baik atau yang biasa diukur dengan menggunakan IPM belum tentu dapat mengurangi ketimpangan. Kemudian, tingkat investasi juga dapat berpengaruh terhadap ketimpangan. Hal ini karena persebaran investasi antarwilayah yang belum merata serta belum optimalnya pemanfaatan investasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu serta pengkajian antara indeks pembangunan manusia dan investasi dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah maka gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani, 2015). Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat membantu peneliti agar proses penelitiannya lebih terarah.

Investasi memegang peranan yang sangat penting terhadap pembangunan di suatu kawasan. Investasi dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah apabila persebaran investasi merata sehingga meningkatkan produktivitas dan pengoptimalan sumber daya alam serta faktor produksi. Dalam penelitian ini variabel investasi dipilih karena perbedaan nilai investasi yang terdiri dari PMDN dan PMA yang mencolok serta tidak merata antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan dan meningkatnya ketimpangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiton (2019) menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan. Sedangkan hasil penelitian Didia (2016) menyimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Variabel pengaruh yang kedua adalah indeks pembangunan manusia. IPM dipilih karena nilai IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berbeda-beda. IPM yang tidak merata berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, sehingga berdampak kepada tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin rendah atau IPM dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah memiliki hubungan yang negatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuntari (2016) menyimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Landasan Teologis

Dalam ekonomi Islam membahas mengenai konsep pembangunan syariah yang diartikan sebagai konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pandangan Ekonomi Islam mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian harus menciptakan keadilan dan harmonis (Beik, 2016). Pembangunan ekonomi di suatu wilayah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil. Al-Farabi dalam Jusmaliani, dkk (2005), yang menyatakan bahwa keadilan sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an (QS. Al-Hujurat (49), at-Taubah (9), al-Mumtahanah (60): 8, al-Maidah (5): 42, al-Fajr (89): 20. Ayat tersebut menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara.

Dalam tafsir Kementerian Agama RI menerangkan bahwa QS. Ar-Rahman ayat 7-9 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit tempat diturunkannya perintah dan larangan-Nya kepada para hamba-Nya melalui perantara malaikat kepada para nabi pilihan. Hal ini agar manusia tidak melampaui dan melangkahi batas-batas keadilan demi kelancaran menjalankan keseimbangan neraca yang telah ditetapkan bagi semua makhluk-Nya. Dari tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan dan keseimbangan itu sangat penting. Manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* wajib menjalankan amanat dari Allah SWT dengan cara selalu memperhatikan keadilan dan keseimbangan seluruh makhluk hidup.

Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok tertentu saja. Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya mengatasi ketimpangan adalah dengan pendistribusian harta yang berkeadilan (Huda, 2017). Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Al-Quran surat *Al Hasyr* ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindari dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakatpun terpenuhi (Shihab, 2012: 111).

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia. Allah SWT telah memerintahkan untuk berbuat adil. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar mendapat pelajaran”

Tujuan utama ekonomi pembangunan pada sistem ekonomi Islam adalah kesejahteraan manusia (*human welfare*). Proses pembangunan ekonomi dalam Islam menurutnya harus memanusiaikan manusia. Tentunya harus terfokus terhadap pendidikan, mengutamakan integrasi sosial dan konservasi terhadap lingkungan. Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan tidak melupakan generasi yang akan datang (*future generation*) (Ibrahim, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang dikumpulkan terdiri data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik (Yusuf, 2014).

Penelitian ini dengan menggunakan metode data panel. Data panel atau *panel pooled data* merupakan gabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan silang waktu (*time series*) (Widarjono, 2016: 363). Dalam penelitian ini mencakup data *cross section* yaitu 29 kabupaten dan 6 kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, serta data *time series* dengan periode waktu dari tahun 2017-2019.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website Badan Pusat Statistik dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret-Mei tahun 2021.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan oleh periset itu sendiri untuk tujuan yang lain, artinya data yang diperoleh oleh pihak kedua (Sugiyono, 2008). Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Data PDRB ADHK menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.
2. Data Jumlah Penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.

3. Data Investasi yang terdiri dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.
4. Data Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.

Adapun data sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu dari tahun 2017-2019 serta menggunakan literatur, *website*, dan jurnal yang sesuai sebagai sumber atau bahan kajian.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PDRB Atas Dasar Harga Konstan, jumlah penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, serta IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan data *time series* selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2019, sehingga populasi berjumlah 105.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2015). Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah *sampling jenuh* atau sensus. *Sampling jenuh* atau sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010: 124). Teknik pengambilan sampel penelitian ini dikarenakan supaya peneliti mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu data 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan 2019.

E. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketimpangan Pembangunan yang disimbolkan dengan huruf (Y). Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan ketidakmerataan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Untuk dapat memberikan gambaran tentang perkembangan masing-masing daerah dari segi pemerataan pembangunan, dapat diamati dengan menggunakan indeks ketimpangan pembangunan antar daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus sebagai berikut (Sjafrizal, 2008: 108):

$$VW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}, \quad 0 < VW < 1$$

Hasil pengukuran Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$. Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

2. Variabel Independen

- a. Investasi (X_1) merupakan penanaman modal di suatu wilayah atau perusahaan tertentu. Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan modal asing. Data yang digunakan yaitu nilai investasi yang terdiri dari PMDN dan PMA masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
- b. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (X_2) merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Data yang digunakan yaitu nilai IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Tabel 3.1
Indikator Variabel

Variabel Bebas (Independen)	
Variabel	Indikator
Investasi (X_1)	1. PMDN 2. PMA
Indeks Pembangunan Manusia (X_2)	1. Tingkat Kesehatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Tingkat Ekonomi
Variabel Terikat (Dependen)	
Variabel	Indikator
Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah (Y)	1. PDRB ADHK 2. Jumlah Penduduk

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, *website* atau sumber lainnya dan kemudian data tersebut dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dan telah diolah oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data jumlah penduduk, PDRB ADHK per kabupaten/kota, data investasi berupa realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, data Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel merupakan analisis data yang menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (Widarjono, 2016: 363). Kemudian model analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Adapun alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Microsoft Excel 2010 dan aplikasi pengolah data Eviews 9.

1. Analisis Data Panel

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section* yaitu data panel yang merupakan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Menggabungkan informasi dari data antar waktu (*time series*) dan gabungan data antar tempat (*cross section*) dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*) (Widarjono, 2016: 363).

Berikut metode regresi data panel yaitu

$$V_w = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

V_w : Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson

INV_{it} : Investasi kabupaten/kota i tahun t

IPM_{it} : IPM di kabupaten/kota i tahun t

i : *Cross Section* (kabupaten/kota)

t : *Time Series* (tahun)

β_0 : Konstanta/Intersept

β_1, β_2 : Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

ε : *error term*

Dalam estimasi data panel, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan antara lain (Widarjono, 2016: 365).

a. *Pooled Least Square (PLS)/Common Effect Model*

Metode *common effect* merupakan suatu estimasi data panel yang hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu atau waktu

(Widarjono, 2016: 365). Dalam model ini terdapat asumsi bahwa intersep dan koefisien regresi nilainya tetap untuk setiap objek penelitian dan waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Metode estimasi ini mengasumsikan bahwa setiap objek memiliki intersep yang berbeda tetapi memiliki koefisien yang sama. Untuk membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya maka digunakan variabel dummy atau variabel semu sehingga metode ini juga disebut *Least Square Dummy Variables (LSDV)*.

c. *Random Effect Model (REM)*

Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti yang digunakan pada *fixed effect*. Metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek. Model *random effect* mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random.

Dalam menentukan estimasi model regresi data panel dilakukan beberapa uji untuk memiliki metode pendekatan estimasi yang sesuai dan menghasilkan regresi yang baik. Pengujian tersebut terdiri dari Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM) dan Uji Hausman (Widarjono, 2016: 372).

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yaitu metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : *Pooled Least Square (PLS)*

H_1 : *Fixed Effect Model (FEM)*

Jika nilai probabilitas *Chi-Square* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah PLS. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect* atau OLS. Uji signifikansi model ini didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect*. Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model* (REM)

Jika nilai probabilitas LM lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan model yang dipilih adalah *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas LM lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan model yang dipilih adalah REM. Namun, untuk lebih memastikan apakah FEM merupakan model terbaik maka diperlukan uji Hausman.

c. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan dalam menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah valid, tidak bias, konsisten, efisien dan memenuhi asumsi dasar untuk regresi data panel. Uji asumsi klasik regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan gambar (grafik). Data yang memiliki distribusi normal akan mengikuti arah grafik histogram dan akan membentuk kurva seperti lonceng. Cara yang kedua yaitu dengan angka atau statistik.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis *Jarque-Bera Test* dengan $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai *probability* $> \alpha$ (0,05) maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal (Widarjono, 2016: 50).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas (Gujarati, 2012).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika varians dari residual

tetap disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Winarno, 2015). Homoskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white.

Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas berada lebih besar $\alpha = 5\%$ atau 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011: 102).

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan atau tidak antara variabel dependen dan variabel independen. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1) Jika hipotesis signifikan positif

$$H_0 : \beta_i \leq 0$$

$$H_1 : \beta_i \geq 0$$

2) Jika hipotesis signifikan negatif

$$H_0 : \beta_i \geq 0$$

$$H_1 : \beta_i \leq 0$$

Kriteria pengujian pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$:

- 1) Jika nilai Prob. T-statistic > 0.05 , maka H_0 diterima, artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
- 2) Jika nilai Prob. T-statistic < 0.05 , maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Sujarweni, 2015).



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.1
Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah



Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ – $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ – $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah $32.544,12 \text{ km}^2$ atau lebih dari seperempat luas wilayah Pulau Jawa. Jawa Tengah merupakan provinsi yang strategis secara geografi, astronomi maupun geologi. Secara geografi, Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut dan samudra. Batas wilayah administratif Jawa Tengah adalah Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia di sebelah selatan (BPS, 2020).

Secara administratif Jawa Tengah terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, atau terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan kota Semarang sebagai ibukota Provinsi. Cilacap merupakan kabupaten terluas yang ada di Jawa Tengah dengan luas $2.138,51 \text{ km}^2$, sedangkan Kota Magelang yang terkecil dengan luas $18,12 \text{ km}^2$ (BPS, 2020).

2. Kondisi Penduduk Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan angka proyeksi penduduk, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 34,72 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah sedikit menurun dari 1.060 pada tahun 2018 menjadi 1.058 di tahun 2019. Angka kepadatan tersebut bermakna bahwa setiap 1 km² wilayah di Jawa Tengah dihuni rata-rata oleh 1.058 penduduk. Surakarta merupakan kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah dengan kepadatan 11.293 penduduk/km². Sedangkan Blora menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk per km² paling sedikit. Setiap 1 km² hanya dihuni rata-rata oleh 479 penduduk (BPS, 2020).

Pola piramida penduduk Jawa Tengah termasuk piramida ekspansif, yaitu didominasi oleh kelompok usia muda. Ini merupakan fase Bonus Demografi, yaitu potensi penduduk muda yang tinggi merupakan potensi Jawa Tengah yang bisa dioptimalkan. Namun di sisi lain hal ini bisa menjadi tantangan dan ancaman pembangunan jika berbagai fasilitas pendukung tidak memadai, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun lapangan kerja (BPS, 2020).

3. Analisis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi. Jika terjadi pertumbuhan yang positif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan yang negatif, hal ini menunjukkan adanya penurunan perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dari tahun ke tahun itu dilakukan dengan perhitungan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil

kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai 5,41 persen lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 5,31 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pun, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih lebih baik.

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen)
Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kabupaten Cilacap	2.58	2.99	2.27
Kabupaten Banyumas	6.34	6.45	6.32
Kabupaten Purbalingga	5.37	5.42	5.65
Kabupaten Banjarnegara	5.65	5.67	5.60
Kabupaten Kebumen	5.15	5.53	5.52
Kabupaten Purworejo	5.27	5.33	5.44
Kabupaten Wonosobo	4.14	5.06	5.61
Kabupaten Magelang	5.50	5.28	5.30
Kabupaten Boyolali	5.80	5.72	5.96
Kabupaten Klaten	5.34	5.47	5.50
Kabupaten Sukoharjo	5.76	5.79	5.92
Kabupaten Wonogiri	5.32	5.41	5.14
Kabupaten Karanganyar	5.77	5.98	5.93
Kabupaten Sragen	5.97	5.75	5.90
Kabupaten Grobogan	5.85	5.83	5.37
Kabupaten Blora	5.98	4.38	4.05
Kabupaten Rembang	6.98	5.89	5.20
Kabupaten Pati	5.67	5.71	5.86
Kabupaten Kudus	3.21	3.24	3.10
Kabupaten Jepara	5.39	5.85	6.02
Kabupaten Demak	5.82	5.40	5.36
Kabupaten Semarang	5.65	5.67	5.39
Kabupaten Temanggung	5.03	5.13	5.05
Kabupaten Kendal	5.78	5.77	5.71
Kabupaten Batang	5.55	5.72	5.39
Kabupaten Pekalongan	5.44	5.76	5.35
Kabupaten Pemasang	5.61	5.69	5.80
Kabupaten Tegal	5.38	5.51	5.58
Kabupaten Brebes	5.65	5.26	5.72
Kota Magelang	5.42	5.46	5.44

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kota Surakarta	5.70	5.75	5.78
Kota Salatiga	5.58	5.84	5.90
Kota Semarang	6.70	6.48	6.81
Kota Pekalongan	5.32	5.69	5.50
Kota Tegal	5.95	5.87	5.77

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2019 terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian. Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota tentunya setiap wilayah mempunyai potensi ekonomi yang berbeda sesuai keadaan wilayahnya masing-masing sehingga akan mempunyai nilai PDRB yang berbeda serta tidak merata pada setiap daerahnya.

B. Hasil Analisis Data

1. Analisa Deskripsi Data Penelitian

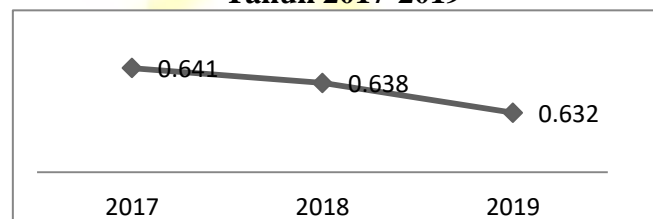
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi yang terkait dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan data jumlah PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah investasi dari PMDN dan PMA, serta angka indeks pembangunan manusia (IPM) dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2019 dengan jumlah observasi sebanyak 105. Pada analisis ini akan menjelaskan hubungan tingkat ketimpangan pembangunan ini melalui variabel dependen Indeks Williamson pada beberapa variabel independen di Provinsi Jawa Tengah menggunakan data panel.

Berikut akan disajikan data secara rinci dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Deskripsi Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan salah satu isu yang masih harus ditangani di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata, serta adanya perbedaan karakteristik pada setiap wilayah. Sehingga menyebabkan adanya wilayah yang lebih maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dihitung menggunakan nilai Indeks Williamson dengan PDRB perkapita sebagai data dasar. Pada grafik di bawah ini nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Grafik 4.1
Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019



Sumber: Data BPS (diolah)

Secara umum selama tahun penelitian, nilai Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Tahun 2017 nilai Indeks Williamson 0,641, tahun 2018 turun menjadi sebesar 0,638, dan menurun lagi tahun 2019 menjadi 0,632. Akan tetapi, ketimpangan pembangunan tersebut masih dalam kategori tinggi.

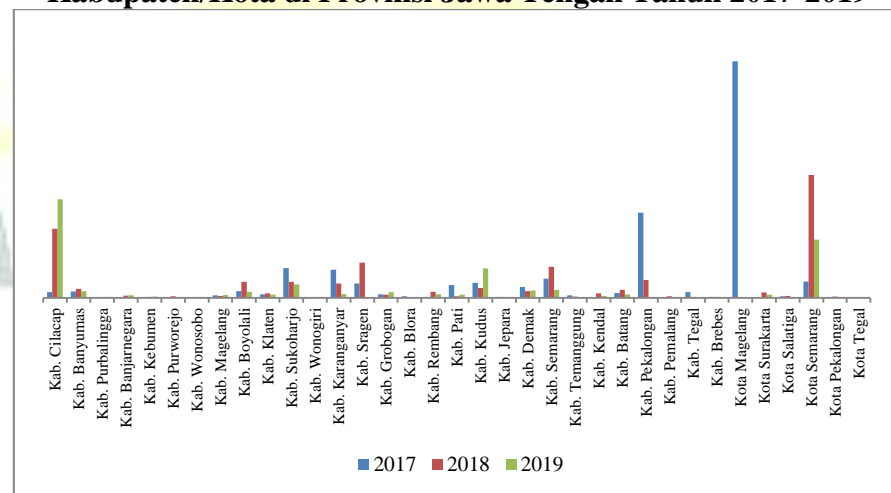
b. Deskripsi Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha baik di wilayah dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya keberadaan investasi yang ada di Indonesia baik di daerah atau di kota ini diharapkan oleh banyak masyarakat maupun pemerintah. Karena investasi yang besar akan memicu pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Perkembangan perekonomian daerah Jawa Tengah, tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah. Dimana dalam upaya pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Investasi atau penanaman modal ini dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Data investasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa jumlah realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Performa investasi Jawa Tengah dalam waktu tiga tahun terakhir, 2017 – 2019 terus mengalami peningkatan. Proyek PMDN meningkat 170 persen. Demikian halnya dengan PMA yang juga mengalami peningkatan sebesar 107,64 persen dari 955 proyek pada tahun 2017 menjadi 1983 pada tahun 2019.

Grafik 4.2
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019

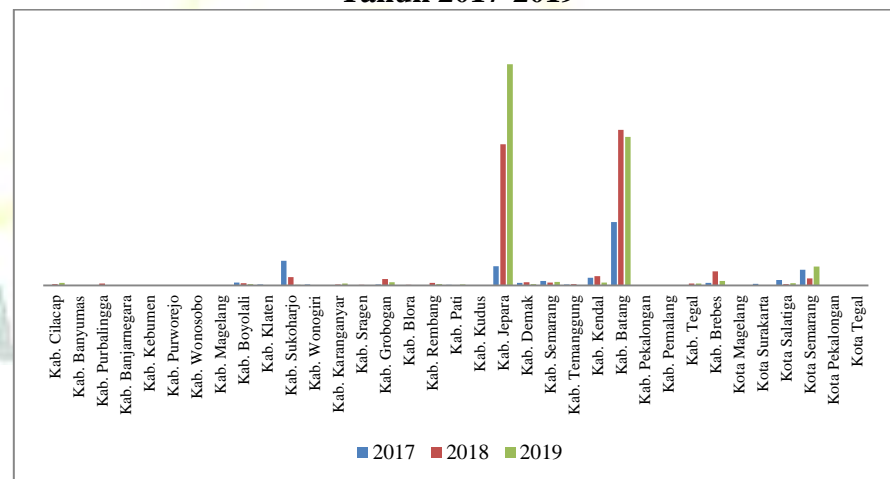


Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan realisasi penanaman modal dalam negeri kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun berfluktuatif (kadang meningkat dan kadang mengalami penurunan). Serta tidak meratanya realisasi PMDN pada masing-masing

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan statistik daerah Provinsi Jawa Tengah 2020 untuk realisasi PMDN terus mengalami penyusutan dari tahun 2017 hingga 2019 sebesar 32,1 persen. Walaupun secara proyek mengalami peningkatan. Penurunan PMDN ini disebabkan oleh beberapa proyek besar yang ada di Jawa Tengah telah selesai pada tahun 2018 dan 2019. Serta penurunan PMDN tersebut diduga antara lain dipengaruhi oleh adanya pelambatan perekonomian global, penundaan rencana kegiatan investasi dan kendala-kendala internal perusahaan. Rata-rata realisasi PMDN yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Magelang. Serta rata-rata realisasi PMDN terendah dari tahun 2017-2019 ditempati oleh Kabupaten Wonosobo.

Grafik 4.3
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

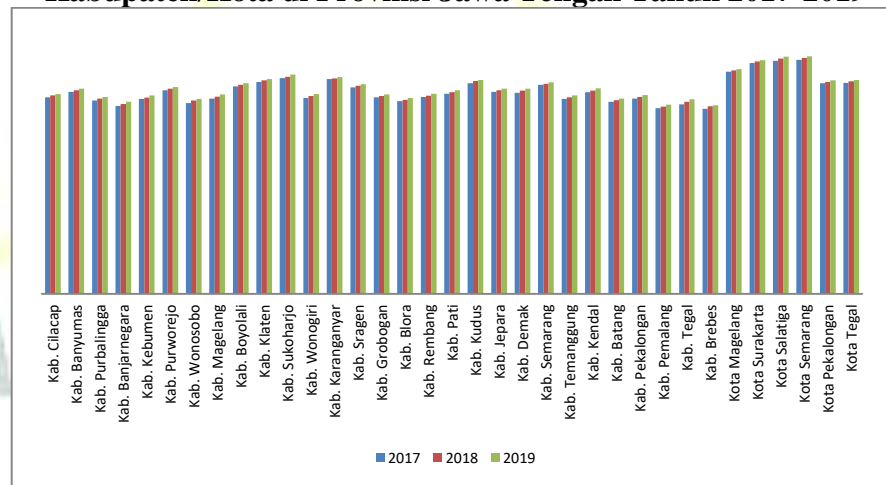
Selama tahun penelitian, jumlah investasi swasta yang berasal dari Penanaman Modal Asing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Akan tetapi, penanaman modal ini tidak merata pada setiap kabupaten/kota. Terdapat wilayah yang belum menjadi sasaran investasi asing ataupun dengan nilai investasi

rendah. Jumlah PMA ini tidak sebesar jumlah PMDN yang masuk pada wilayah ini dan cenderung fluktuatif, akan tetapi secara kumulatif jumlah investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah relatif meningkat.

c. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia ini dibentuk dari 3 dimensi dasar antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Data indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini berupa nilai indeks pembangunan manusia 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Grafik 4.4
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada grafik di atas, terlihat adanya peningkatan IPM secara berkelanjutan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan nilai IPM ini tentunya tidak merata pada setiap wilayah karena perbedaan kondisi demografis. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan IPM sangat tinggi atau > 80 adalah Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Capaian IPM tinggi

dengan nilai 70 – 80 di Jawa Tengah ada pada 17 kabupaten/kota dan capaian IPM sedang dengan nilai 60 – 70 diperoleh oleh 15 kabupaten/kota. Sedangkan IPM dengan kategori rendah atau nilai < 60 tidak ditemukan di Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Gap antara IPM tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Jawa Tengah, pada tahun 2019 sebesar 17,07 poin, sedikit melebar dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 17,05 poin. IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Brebes sebesar 66,12 persen dan IPM tertinggi dicapai oleh IPM Kota Semarang sebesar 83,19 persen.

2. Hasil dan Pembahasan Analisa

a. Pemilihan Model Regresi

Dalam data panel terdapat tiga model pendekatan yang menentukan hasil regresi antara lain *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Pengujian estimasi model dilakukan untuk mencari model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis ekonometrika. Pengujian estimasi model ada dua cara, yaitu uji chow dan uji hausman. Hasil dari uji estimasi model adalah sebagai berikut.

1) Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih model estimasi yang terbaik di antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila hasil uji chow diperoleh angka probabilitas *Chi-Square* lebih dari 0,05 maka model yang digunakan adalah model *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-Square* diperoleh kurang dari 0,05 maka model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Berikut adalah hasil pemilihan model regresi yang telah dilakukan.

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.829793	(34,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	255.666517	34	0.0000

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Hasil uji signifikansi yang merupakan perbandingan antara model *common effect* dan *fixed effect* dapat dilihat dari hasil analisis *Redundant Fixed Effect-Likelihood Ratio*. Berdasarkan hasil uji chow pada tabel di atas diperoleh angka Probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 artinya kurang dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Pada saat model yang terpilih adalah *fixed effect* maka diperlukan uji hausman untuk mengetahui apakah sebaiknya menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*.

2) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan dalam menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *random effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang sebaiknya digunakan adalah *fixed effect*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	708.212956	2	0.0000

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

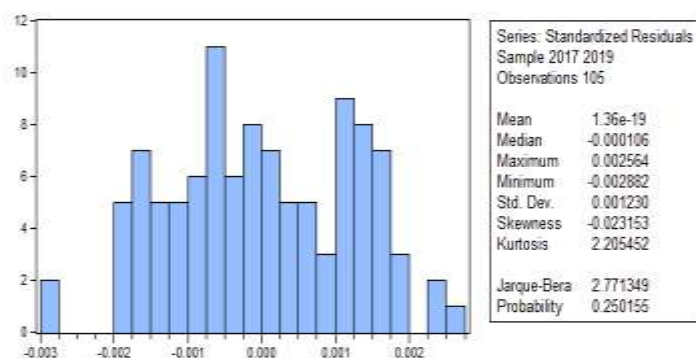
Berdasarkan hasil uji hausman, diketahui bahwa nilai Probabilitas *Cross-section random* adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat menggunakan analisis *Jarque-Bera Test* dengan $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai *probability* > $\alpha = 0,50$ maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Probabilitas sebesar 0.250155 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel bebas dalam model regresi. Variabel bebas (independen) yang baik adalah variabel bebas yang tidak memiliki korelasi diantaranya. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen $\leq 0,8$ menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

	Investasi (X1)	IPM (X2)	Keterangan
Investasi (X1)	1.000000	0.251661	Tidak terjadi multikolinearitas
IPM (X2)	0.251661	1.000000	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan di atas, seluruh koefisien korelasi kurang dari 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas berada di atas $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.007475	0.009414	-0.794061	0.4299
Investasi (X1)	0.001161	0.004166	0.278648	0.7814
IPM (X2)	0.118360	0.131080	0.902956	0.3697

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Berdasarkan uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model tersebut.

c. Uji Signifikansi

1) Uji t Statistik

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (investasi dan indeks pembangunan manusia) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (ketimpangan pembangunan antarwilayah).

Tabel 4.6
Hasil Uji t Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.212790	0.021508	56.38814	0.0000
Investasi (X1)	0.008201	0.009518	0.861681	0.3919
IPM (X2)	-8.025924	0.299480	-26.79952	0.0000

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Berdasarkan hasil uji hipotesis atas masing-masing variabel penelitian maka dapat dijelaskan sebagai berikut

a) Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Dari hasil regresi diketahui variabel investasi memiliki probabilitas sebesar 0.3919. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan

pembangunan antarwilayah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditolak. Nilai koefisien regresi untuk variabel investasi menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 0.008201. Artinya kenaikan 1% investasi akan diikuti kenaikan ketimpangan pembangunan antarwilayah sebesar 0.0082%.

b) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki probabilitas sebesar 0.0000. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Nilai koefisien regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar -8.025924. Artinya kenaikan 1% indeks pembangunan manusia akan diikuti penurunan ketimpangan pembangunan sebesar 8.02%.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terganggunya.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.914663
Adjusted R-squared	0.869485

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.869485. Hal ini berarti bahwa 86,94% ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel investasi dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan sisanya 13,06% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel investasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dari hasil uji chow dan uji hausman, model regresi data panel terbaik yang digunakan yaitu dengan *fixed effect model* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$V_w = 1.212790 + 0.008201INV_{it} - 8.025924IPM_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

V_w : Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson

INV : Investasi

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Berikut ini adalah hasil estimasi model *fixed effect* untuk variabel investasi dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen serta ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai variabel dependen. Hasil estimasi persamaan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Sample: 2017 2019
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.212790	0.021508	56.38814	0.0000
Investasi (X1)	0.008201	0.009518	0.861681	0.3919
IPM (X2)	-8.025924	0.299480	-26.79952	0.0000
R-squared	0.914663			
Adjusted R-squared	0.869485			
F-statistic	20.24566			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output pengolahan data menggunakan Eviews 9

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Investasi merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Hasil regresi penelitian ini, nilai probabilitas variabel independen investasi sebesar 0.3919. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditolak. Karena menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara investasi dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah maka dalam setiap peningkatan investasi belum memberikan hasil yang maksimal terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di kabupaten/kota tersebut.

Selanjutnya nilai koefisien regresi variabel investasi sebesar 0.008201. Hal ini menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Artinya kenaikan 1% investasi akan diikuti kenaikan ketimpangan pembangunan sebesar 0.0082%. Dengan demikian semakin tinggi realisasi investasi atau penanaman modal pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan pada wilayah bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi PMDN dan PMA belum memberikan hasil yang maksimal terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dalam teori Myrdal mengemukakan bahwa adanya perpindahan modal dan motif laba yang cenderung meningkat maka akan meningkatkan pula ketimpangan antarwilayah dan hal tersebut terbukti di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Menurut Myrdal adanya motif laba yang dapat mendorong berkembangnya suatu pembangunan di masing-masing wilayah yang hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba atau keuntungan dalam investasi yang tinggi, sementara wilayah-wilayah lain semakin terbelakang.

Investasi merupakan penanaman modal dari para investor dalam menciptakan proses pembangunan suatu daerah. Semakin besar investasi yang ditanamkan maka dapat diasumsikan bahwa proses pembangunan dalam menciptakan perputaran roda perekonomian juga akan tinggi. Akan tetapi apabila perkembangan positif investasi tersebut tidak

didukung oleh sumber daya alam yang maksimal, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, infrastruktur yang belum memadai, tentunya menyebabkan persebaran yang tidak merata dan berakibat pada ketimpangan antarwilayah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Didia (2016) mengenai analisis ketimpangan pembangunan yang menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memicu pertumbuhan investasi di setiap wilayah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan lagi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

Investasi dalam penelitian ini yang merupakan jumlah antara PMDN dan PMA tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena investasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang berperan besar dalam penurunan tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah, walaupun tren investasi di Jawa Tengah yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Investasi di Jawa Tengah hanya terfokus pada beberapa daerah dan belum merata di segala sektor, serta disinyalir kesiapan daerah dalam memanfaatkan investasi masih belum optimal. Selain itu masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar daerah juga menjadi hambatan investasi yang sepenuhnya belum maksimal. Infrastruktur fisik berperan penting karena menjadi pondasi dasar sehingga sektor industri dan kegiatan investasi di daerah digerakkan.

Investasi menciptakan perusahaan lokal yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah setempat dan wilayah lain di sekitarnya sehingga tidak mempengaruhi terhadap ketimpangan pembangunan. Dalam hal ini investor tidak hanya menggunakan tenaga kerja di wilayah investasi tetapi juga menggunakan tenaga kerja wilayah lain. Oleh karena itu,

investasi di suatu wilayah tidak hanya dinikmati dan berdampak pada wilayah tersebut tetapi juga mempengaruhi wilayah lainnya yang berdekatan. Hal tersebut menyebabkan investasi di suatu wilayah tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah lain. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara terus-menerus dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita.

Investasi memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Namun dengan adanya investasi, seluruh komponen ekonomi penurun ketimpangan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menunjang pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dengan pengaturan kebijakan yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah agar menarik para investor seperti halnya mengenai perolehan kemudahan perizinan penanaman modal serta menciptakan kondisi investasi yang kondusif dan mendorong pemerataan distribusi investasi pada setiap wilayah. Investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif, pemerintah melakukan kebijakan melalui pemberian kemudahan perijinan, perbaikan dan sistem layanan yang mudah, murah, cepat dan tepat. Selain itu, kebijakan investasi harus sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah. Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan *digital investment*

promotion serta pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota. Untuk mendorong masuknya investasi di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan dari sisi infrastruktur misalnya bandara, pelabuhan, jalan tol, perkeretaapian, ketenagalistrikan, dan kawasan industri.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia. IPM ini menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. IPM sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Semakin baik nilai IPM maka tingkat ketimpangan pembangunan wilayah akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila nilai IPM rendah maka dapat mengakibatkan tingkat ketimpangan pembangunan semakin tinggi.

Dari hasil regresi pada penelitian ini diketahui variabel IPM memiliki probabilitas sebesar 0.0000. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima.

Nilai koefisien regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar -8.025924. Artinya kenaikan 1% indeks pembangunan manusia akan diikuti penurunan ketimpangan pembangunan sebesar 8.02%. Dengan demikian semakin tinggi IPM pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pembangunan pada wilayah bersangkutan.

IPM yang merupakan indikator pengukuran kualitas sumber daya manusia ternyata berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan teori *human capital* menurut Becker bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akan memiliki pekerjaan dan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan manusia yang memiliki pendidikan rendah. Jika tingkat pendapatan dapat mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan perekonomian pun akan lebih baik sehingga adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan itu sendiri.

Faktor IPM yang memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah yaitu naiknya IPM Kabupaten/Kota di wilayah ini. Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan. Dari 35 Kabupaten/Kota 24 diantaranya mengalami kenaikan, hanya 9 Kabupaten/Kota yang justru mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara optimal setiap tahunnya pada seluruh dimensi dasar IPM yang juga menunjukkan kenaikan. Apabila pemerintah mampu memenuhi fasilitas publik serta perbaikan yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat maka dapat menjadikan taraf kehidupan juga berubah. Sehingga IPM yang meningkat pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuntari (2016) mengenai disparitas pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan produksinya. Produktivitas tersebut ditingkatkan

melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik. Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain IPM memiliki peran penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan mengurangi disparitas pembangunan.

IPM yang mengalami peningkatan tentunya didukung oleh tiga dimensi dasar IPM, salah satunya yaitu dimensi kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan pangan dan gizi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), serta peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Berdasarkan hasil Kajian Fiskal Regional Jawa Tengah Tahun 2019 upaya Jawa Tengah dalam meningkatkan IPM salah satunya adalah melalui aksi konvergensi *stunting*. Hal ini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, yaitu peningkatan upaya penerapan paradigma sehat melalui pencegahan dan penanganan *stunting*. Dimensi kesehatan ini berkaitan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang semakin membaik.

Selain dimensi kesehatan, pemerintah juga mengupayakan peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan sumber daya manusia. Beberapa program pemerintah antara lain program Kartu Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi, serta Beasiswa LPDP. Program tersebut berpengaruh terhadap peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah. Apabila terjadi perbaikan pendidikan pada daerah tersebut maka akan memperbaiki *skill* yang dimiliki oleh sumber daya manusia di daerah tersebut. Sehingga sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kerja yang lebih baik akan menghasilkan output produksi yang lebih baik lagi dan mampu lebih produktif yang akan memberikan dampak mengurangi tingkat ketimpangan wilayah.

3. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Perspektif Ekonomi Islam

Indonesia kini telah mendapatkan banyak kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan agar lebih baik. Di masa sekarang ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh umat Islam adalah bagaimana membangun perekonomian yang selaras dengan aturan-aturan syariah yang berpedoman pada Al Quran dan Hadits. Tentunya beberapa daerah umumnya sedang mengalami masalah akibat pembangunan ekonomi yaitu adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Ketimpangan pembangunan tersebut juga dialami Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia serta perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap daerah yang nantinya akan berakibat pada kemiskinan, keterbelakangan dan stagnansi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Pertumbuhan ekonomi tentunya berkaitan juga dengan pembangunan ekonomi. Fokus utama pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Pembangunan manusia tercermin dari IPM. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Salah satu bentuk adanya ketidakmerataan dalam pertumbuhan yaitu ketimpangan. Anjuran Islam mengenai kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mengakumulasi modal, tetapi untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Salah satu hal yang belum mencerminkan adanya kesejahteraan dalam masyarakat yaitu terjadi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan ini dapat membuat individu tidak dapat menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya. Bahkan kemiskinan dapat mengantarkan kepada kekufuran.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat tentunya tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menjalankan perekonomian dengan baik, diharapkan keadilan dan kesejahteraan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya sumber daya modal secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan perekonomian rakyat dan mengentaskan ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah. Penyebab dari ketimpangan yaitu ketidakmerataan. Ketidakmerataan terjadi pada alokasi investasi dari penanaman modal dalam negeri serta penanaman modal asing yang berbeda pada setiap wilayah. Hal tersebut belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam menurut teori Yusuf Qardhawi yaitu sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan keadilan. Ekonomi Islam melarang adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin.

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Kebijakan distribusi harta untuk menggerakkan perekonomian yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi wilayah yang lebih baik melalui investasi. Kebijakan distribusi investasi ini harus diperkuat dengan prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun demikian menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan pemerintah atau masyarakat. Hal tersebut berarti diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kondisi iklim investasi yang kondusif serta memanfaatkan secara optimal sesuai dengan prinsip yang jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Yang berarti bahwa kualitas sumber daya

manusia disini sangat berpengaruh. Indeks pembangunan manusia ini merupakan salah satu hal yang dapat mengaktualisasikan fungsi kekhalfahan dan pembangun yang sangat dihargai oleh ajaran syariat Islam. Agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik diperlukan sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu hanya dapat dipenuhi melalui proses pendidikan. Allah mengutus manusia untuk mensejahterakan kehidupan di bumi. Ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan manusia adalah kemaslahatan umat atau kesejahteraan (*falah*). Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Tentunya kesejahteraan ini merata pada setiap daerah sehingga tidak menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk ketimpangan pembangunan.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan alat analisis yang digunakan serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini antara lain investasi dan indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel dependennya adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah yang diukur dengan menggunakan variabel Indeks Williamson kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Oleh karena itu, dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Pada variabel investasi yang ditunjukkan dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh secara signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0.008201 terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang terus meningkat tetapi tidak merata pada setiap wilayah serta pemanfaatan investasi yang belum maksimal dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
2. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar -8.025924 terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Hal ini terjadi karena IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, serta menunjukkan bahwa meningkatnya indeks pembangunan manusia keseluruhan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah.

B. Saran

Dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, beberapa saran yang dapat diberikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah, saran yang dapat diberikan sebaiknya pemerintah daerah mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperhatikan arus realisasi investasi yang masuk baik dari dalam negeri maupun investasi asing. Perlu peningkatan faktor-faktor yang dapat mendukung investasi daerah. Pemerintah perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan penanaman modal daerah seperti penguatan infrastruktur dan kemudahan perolehan perizinan. Selain itu, dalam melakukan pembangunan ekonomi sektor investasi sebaiknya pemerintah mengembangkan aspek pemerataan pada setiap wilayah. Karena investasi yang tidak merata merupakan faktor yang dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
3. Ketiga, hendaknya pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, serta standar kehidupan sebagai *human capital investment*. Pemerintah perlu mencanangkan program-program yang mampu meningkatkan IPM secara gencar, karena terbukti bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah.
4. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel faktor ketimpangan pembangunan yang lebih beragam sebagai bahan pertimbangan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggraini, Yusniah. 2018. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Beik, Irfan. S., & Arsyianti, Laeli D. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Nurul, dkk. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jhingan, M. L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Juliyansyah, Noor. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, disertasi, tesis dan karya ilmiah*. Jakarta : KDT.
- Mankiw, Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Salim, & Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Buana Press.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Kencana.

- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suryani, & Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2016. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

JURNAL

- Alfiansyah, Hendry., & Budyanra. 2019. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017". *Politeknik Statistika STIS*.
- An dhiani, Kartira Dorcas, dkk. 2018. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera". *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol. 7, No.1.
- Aprianto, Naerul Edwin K. 2016. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2.
- Didia, Khoir Akfina. 2016. "Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur". *Economic Development Analysis Journal*, 5(1).
- Gultom, Rifyal Zuhdi., & Annisa Q. Tini. 2020. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 60(02).
- Harun, Lukman., & Ghozali Maski. 2012. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)". Universitas Brawijaya.

- Hidayat, Muhammad., dkk. 2018. "Inequality of Interregional Development in Riau Indonesia; Panel Data Regression Approach". *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 8 Issue 5.
- Ibrahim, dkk. 2011. "Sustainable Economic Development: Concept, Principles and Management from Islamic Perspective". *European Journal of Social Sciences*, 24 (3).
- Islami, Fitrah Sari., & Nugroho SBM. 2018. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur Indonesia". *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 33 No. 1.
- Kiton, Mario Andrias. 2019. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Ilmiah Smart*. Volume III No.2.
- Kurniawan, Benedictus Riandoko Adi., & FX Sugiyanto. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010". *Diponegoro Journal of Economics*. Volume 2, Nomor 1.
- Maryati, Ari., dkk. 2019. "Inequality Between The Region In The Province Of Central Java 2012–2016". *International Conference on Rural Development and Entrepreneurship 2019 : Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0*. Vol. 5 No.1.
- Maskanudin, dkk. 2018. "Analysis of Inequality of Economic Development in Districts/Cities Region of Kedu in Central Java Province". *EKO-REGIONAL*. Vol. 13, No.2.
- Munthe, Marabon. 2014. "Konsep Distribusi Dalam Islam". *Jurnal Syariah*. Vol, 2 No. 1.
- Noto, Gantara Hadi. 2016. "Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Rahmawaty, Anita. 2013. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif". *Equilibrium*. Vol.1 No. 1.
- Ravinthirakumaran, Kalaichelvi., & Navaratnam Ravinthirakumaran. 2021. "The Impact Of Foreign Direct Investment On Income Inequality: A Panel Autogressive Distributed Lag Approach For The Asia-Pacific Economic Cooperation Developing Economies". *Asia-Pacific Sustainable Development Journal*. Vol. 25 No. 1.

- Soeharjoto. 2019. "Factors That Affect Inequality Distribution Income In Central Java". *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research*. Vol. 3 Issue. 4.
- Sutarno, & Mudrajad Kuncoro. 2003. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8 No. 2.
- Suryanto, Tulus, dkk. 2018. "Tax Revenue and Disparity: How to Improvement Income Inequality in Islamic Perspectiv". *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*. Vol. 5, No. 2.
- Wahyuntari, Linda Ika., & Amin Pujiati. 2018. "Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah". *Economics Development Anlysis Journal (EDAJ)*. Volume 5, Nomor 3. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Yeniwati. 2013. "Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera". *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. II, No.03.

SKRIPSI/TESIS

- Angelia, Yuki. 2010. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arsita, Ayu. 2019. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Aglomerasi, dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Banendro, Sigit Dwiwahju. 2016. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012". *Tesis*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUMBER LAIN

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2020. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2020. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia.

Bappeda. 2018. *RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023*. Jawa Tengah: Publikasi Bappeda.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2020. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2019*. Jawa Tengah: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

United Nation Development Programme (UNDP). 2017. *Human Development Report*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Estimasi Data Panel

A. *Common Effect Model*

Dependent Variable: Ketimpangan (Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/24/21 Time: 11:47

Sample: 2017 2019

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.645932	0.006860	94.16558	0.0000
Investasi (X1)	0.025261	0.020679	1.221609	0.2247
IPM (X2)	-0.132026	0.095959	-1.375860	0.1719
R-squared	0.025891	Mean dependent var		0.636667
Adjusted R-squared	0.006791	S.D. dependent var		0.004210
S.E. of regression	0.004196	Akaike info criterion		-8.081352
Sum squared resid	0.001796	Schwarz criterion		-8.005525
Log likelihood	427.2710	Hannan-Quinn criter.		-8.050625
F-statistic	1.355527	Durbin-Watson stat		1.614853
Prob(F-statistic)	0.262416			

IAIN PURWOKERTO

B. *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Ketimpangan (Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/24/21 Time: 11:48

Sample: 2017 2019

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.212790	0.021508	56.38814	0.0000
Investasi (X1)	0.008201	0.009517	0.861694	0.3919
IPM (X2)	-8.025923	0.299480	-26.79952	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.914663	Mean dependent var	0.636667
Adjusted R-squared	0.869485	S.D. dependent var	0.004210
S.E. of regression	0.001521	Akaike info criterion	-9.868652
Sum squared resid	0.000157	Schwarz criterion	-8.933447
Log likelihood	555.1042	Hannan-Quinn criter.	-9.489689
F-statistic	20.24566	Durbin-Watson stat	3.532767
Prob(F-statistic)	0.000000		

IAIN PURWOKERTO

C. *Random Effect Model*

Dependent Variable: Ketimpangan (Y)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/24/21 Time: 11:49
 Sample: 2017 2019
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.645932	0.002487	259.7661	0.0000
Investasi (X1)	0.025261	0.007496	3.369943	0.0011
IPM (X2)	-0.132026	0.034785	-3.795462	0.0003

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.001521	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.025891	Mean dependent var	0.636667
Adjusted R-squared	0.006791	S.D. dependent var	0.004210
S.E. of regression	0.004196	Sum squared resid	0.001796
F-statistic	1.355527	Durbin-Watson stat	1.614853
Prob(F-statistic)	0.262416		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.025891	Mean dependent var	0.636667
Sum squared resid	0.001796	Durbin-Watson stat	1.614853

D. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.829792	(34,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	255.666514	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Ketimpangan (Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/24/21 Time: 11:51

Sample: 2017 2019

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.645932	0.006860	94.16558	0.0000
Investasi (X1)	0.025261	0.020679	1.221609	0.2247
IPM (X2)	-0.132026	0.095959	-1.375860	0.1719
R-squared	0.025891	Mean dependent var		0.636667
Adjusted R-squared	0.006791	S.D. dependent var		0.004210
S.E. of regression	0.004196	Akaike info criterion		-8.081352
Sum squared resid	0.001796	Schwarz criterion		-8.005525
Log likelihood	427.2710	Hannan-Quinn criter.		-8.050625
F-statistic	1.355527	Durbin-Watson stat		1.614853
Prob(F-statistic)	0.262416			

E. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	708.212939	2	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
Investasi (X1)	0.008201	0.025261	0.000034	0.0036
IPM (X2)	-8.025923	-0.132026	0.088478	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 05/24/21 Time: 11:53

Sample: 2017 2019

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.212790	0.021508	56.38814	0.0000
Investasi (X1)	0.008201	0.009517	0.861694	0.3919
IPM (X2)	-8.025923	0.299480	-26.79952	0.0000

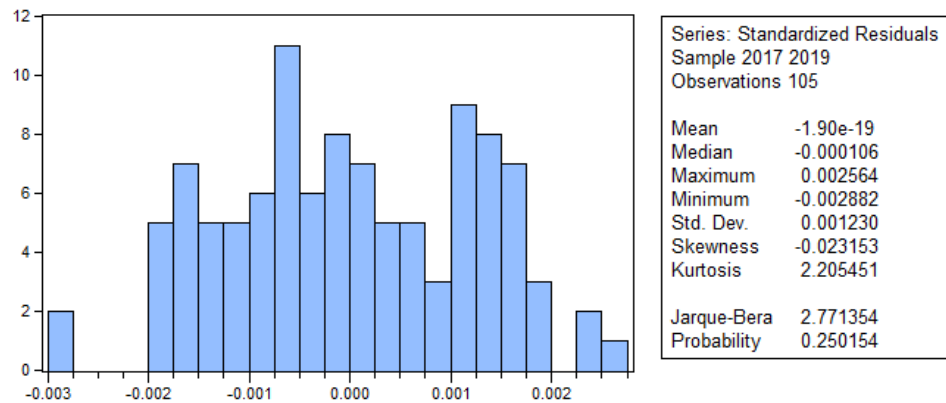
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.914663	Mean dependent var	0.636667
Adjusted R-squared	0.869485	S.D. dependent var	0.004210
S.E. of regression	0.001521	Akaike info criterion	-9.868652
Sum squared resid	0.000157	Schwarz criterion	-8.933447
Log likelihood	555.1042	Hannan-Quinn criter.	-9.489689
F-statistic	20.24566	Durbin-Watson stat	3.532767
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 2 : Hasil Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas



B. Uji Multikolinearitas

	Investasi (X1)	IPM (X2)
Investasi (X1)	1.000000	0.251661
IPM (X2)	0.251661	1.000000

C. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/30/21 Time: 15:17
 Sample: 2017 2019
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.007475	0.009414	-0.794061	0.4299
X1	0.001161	0.004166	0.278648	0.7814
X2	0.118360	0.131080	0.902956	0.3697

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.337942	Mean dependent var	0.001032
Adjusted R-squared	-0.012559	S.D. dependent var	0.000662
S.E. of regression	0.000666	Akaike info criterion	-11.52113
Sum squared resid	3.01E-05	Schwarz criterion	-10.58593
Log likelihood	641.8593	Hannan-Quinn criter.	-11.14217
F-statistic	0.964168	Durbin-Watson stat	2.573505
Prob(F-statistic)	0.537578		

Lampiran 3 : Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Ketimpangan (Y)	Investasi (X1)	IPM (X2)
Kabupaten Cilacap	2017	0.641	0.003984	0.06890
Kabupaten Cilacap	2018	0.638	0.048144	0.06956
Kabupaten Cilacap	2019	0.631	0.068476	0.06998
Kabupaten Banyumas	2017	0.641	0.004426	0.07075
Kabupaten Banyumas	2018	0.638	0.006154	0.07130
Kabupaten Banyumas	2019	0.631	0.004618	0.07196
Kabupaten Purbalingga	2017	0.641	0.000474	0.06772
Kabupaten Purbalingga	2018	0.638	0.000215	0.06841
Kabupaten Purbalingga	2019	0.631	0.000531	0.06899
Kabupaten Banjarnegara	2017	0.641	0.000526	0.06586
Kabupaten Banjarnegara	2018	0.638	0.001486	0.06654
Kabupaten Banjarnegara	2019	0.631	0.001681	0.06734
Kabupaten Kebumen	2017	0.641	0.000171	0.06829
Kabupaten Kebumen	2018	0.638	0.000714	0.06880
Kabupaten Kebumen	2019	0.631	0.000784	0.06960
Kabupaten Purworejo	2017	0.641	0.000139	0.07131
Kabupaten Purworejo	2018	0.638	0.001132	0.07187
Kabupaten Purworejo	2019	0.631	0.000184	0.07250
Kabupaten Wonosobo	2017	0.641	0.000017	0.06689
Kabupaten Wonosobo	2018	0.638	0.000161	0.06781
Kabupaten Wonosobo	2019	0.631	0.000147	0.06827
Kabupaten Magelang	2017	0.641	0.001853	0.06839
Kabupaten Magelang	2018	0.638	0.001282	0.06911
Kabupaten Magelang	2019	0.631	0.001939	0.06987
Kabupaten Boyolali	2017	0.641	0.004930	0.07264
Kabupaten Boyolali	2018	0.638	0.011289	0.07322
Kabupaten Boyolali	2019	0.631	0.004303	0.07380
Kabupaten Klaten	2017	0.641	0.002537	0.07425
Kabupaten Klaten	2018	0.638	0.003029	0.07479
Kabupaten Klaten	2019	0.631	0.002155	0.07529
Kabupaten Sukoharjo	2017	0.641	0.022161	0.07556
Kabupaten Sukoharjo	2018	0.638	0.011608	0.07607
Kabupaten Sukoharjo	2019	0.631	0.009265	0.07684
Kabupaten Wonogiri	2017	0.641	0.000479	0.06866
Kabupaten Wonogiri	2018	0.638	0.000427	0.06937
Kabupaten Wonogiri	2019	0.631	0.000596	0.06998
Kabupaten Karanganyar	2017	0.641	0.019612	0.07522
Kabupaten Karanganyar	2018	0.638	0.009966	0.07554

Kabupaten/Kota	Tahun	Ketimpangan (Y)	Investasi (X1)	IPM (X2)
Kabupaten Karanganyar	2019	0.631	0.002748	0.07589
Kabupaten Sragen	2017	0.641	0.010025	0.07240
Kabupaten Sragen	2018	0.638	0.024466	0.07296
Kabupaten Sragen	2019	0.631	0.000356	0.07343
Kabupaten Grobogan	2017	0.641	0.002551	0.06887
Kabupaten Grobogan	2018	0.638	0.002585	0.06932
Kabupaten Grobogan	2019	0.631	0.004137	0.06986
Kabupaten Blora	2017	0.641	0.001004	0.06752
Kabupaten Blora	2018	0.638	0.000175	0.06795
Kabupaten Blora	2019	0.631	0.000028	0.06865
Kabupaten Rembang	2017	0.641	0.000748	0.06895
Kabupaten Rembang	2018	0.638	0.004445	0.06946
Kabupaten Rembang	2019	0.631	0.002516	0.07015
Kabupaten Pati	2017	0.641	0.008952	0.07012
Kabupaten Pati	2018	0.638	0.001063	0.07071
Kabupaten Pati	2019	0.631	0.002275	0.07135
Kabupaten Kudus	2017	0.641	0.010350	0.07384
Kabupaten Kudus	2018	0.638	0.006873	0.07458
Kabupaten Kudus	2019	0.631	0.020425	0.07494
Kabupaten Jepara	2017	0.641	0.001812	0.07079
Kabupaten Jepara	2018	0.638	0.009242	0.07138
Kabupaten Jepara	2019	0.631	0.014520	0.07188
Kabupaten Demak	2017	0.641	0.007763	0.07041
Kabupaten Demak	2018	0.638	0.004853	0.07126
Kabupaten Demak	2019	0.631	0.005261	0.07187
Kabupaten Semarang	2017	0.641	0.013685	0.07320
Kabupaten Semarang	2018	0.638	0.021607	0.07361
Kabupaten Semarang	2019	0.631	0.005688	0.07414
Kabupaten Temanggung	2017	0.641	0.001722	0.06834
Kabupaten Temanggung	2018	0.638	0.001025	0.06883
Kabupaten Temanggung	2019	0.631	0.000078	0.06956
Kabupaten Kendal	2017	0.641	0.000553	0.07062
Kabupaten Kendal	2018	0.638	0.003722	0.07128
Kabupaten Kendal	2019	0.631	0.001547	0.07197
Kabupaten Batang	2017	0.641	0.007326	0.06735
Kabupaten Batang	2018	0.638	0.015540	0.06786
Kabupaten Batang	2019	0.631	0.012051	0.06842
Kabupaten Pekalongan	2017	0.641	0.059074	0.06840
Kabupaten Pekalongan	2018	0.638	0.012410	0.06897

Kabupaten/Kota	Tahun	Ketimpangan (Y)	Investasi (X1)	IPM (X2)
Kabupaten Pekalongan	2019	0.631	0.000408	0.06971
Kabupaten Pemasang	2017	0.641	0.000035	0.06504
Kabupaten Pemasang	2018	0.638	0.001045	0.06567
Kabupaten Pemasang	2019	0.631	0.000538	0.06632
Kabupaten Tegal	2017	0.641	0.004067	0.06644
Kabupaten Tegal	2018	0.638	0.000730	0.06733
Kabupaten Tegal	2019	0.631	0.000544	0.06824
Kabupaten Brebes	2017	0.641	0.000810	0.06486
Kabupaten Brebes	2018	0.638	0.001588	0.06568
Kabupaten Brebes	2019	0.631	0.000738	0.06612
Kota Magelang	2017	0.641	0.164190	0.07784
Kota Magelang	2018	0.638	0.000130	0.07831
Kota Magelang	2019	0.631	0.000258	0.07880
Kota Surakarta	2017	0.641	0.000402	0.08085
Kota Surakarta	2018	0.638	0.003834	0.08146
Kota Surakarta	2019	0.631	0.002133	0.08186
Kota Salatiga	2017	0.641	0.001353	0.08168
Kota Salatiga	2018	0.638	0.001316	0.08241
Kota Salatiga	2019	0.631	0.000380	0.08312
Kota Semarang	2017	0.641	0.012308	0.08201
Kota Semarang	2018	0.638	0.085808	0.08272
Kota Semarang	2019	0.631	0.041702	0.08319
Kota Pekalongan	2017	0.641	0.000513	0.07377
Kota Pekalongan	2018	0.638	0.000967	0.07424
Kota Pekalongan	2019	0.631	0.000243	0.07477
Kota Tegal	2017	0.641	0.000344	0.07395
Kota Tegal	2018	0.638	0.000146	0.07444
Kota Tegal	2019	0.631	0.000369	0.07493

Lampiran 4: Indeks Williamson

Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Kabupaten/Kota	PDRB	f_i	N	y_i	y	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2 * f_i$	$(y_i - y)^2 * f_i / N$
		Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Kabupaten Cilacap	95,254,586.70	1,771,627	34,317,865	53.767	26.998	26.769	716.565	1,269,485,527	36.99197
Kabupaten Banyumas	35,147,313.30	1,665,025	34,317,865	21.109	26.998	-5.889	34.678	57,740,061	1.68251
Kabupaten Purbalingga	15,612,285.90	916,427	34,317,865	17.036	26.998	-9.962	99.241	90,946,831	2.65013
Kabupaten Banjarnegara	13,663,266.65	912,917	34,317,865	14.967	26.998	-12.031	144.755	132,148,848	3.85073
Kabupaten Kebumen	17,794,789.30	1,192,007	34,317,865	14.928	26.998	-12.070	145.675	173,645,138	5.05991
Kabupaten Purworejo	12,023,780.44	714,574	34,317,865	16.827	26.998	-10.171	103.459	73,929,385	2.15425
Kabupaten Wonosobo	12,436,048.84	784,207	34,317,865	15.858	26.998	-11.140	124.097	97,317,675	2.83577
Kabupaten Magelang	20,974,801.01	1,268,396	34,317,865	16.536	26.998	-10.462	109.443	138,817,657	4.04506
Kabupaten Boyolali	20,248,849.44	974,579	34,317,865	20.777	26.998	-6.221	38.701	37,716,759	1.09904
Kabupaten Klaten	24,993,103.27	1,167,401	34,317,865	21.409	26.998	-5.589	31.235	36,463,607	1.06253
Kabupaten Sukoharjo	24,163,939.48	878,374	34,317,865	27.510	26.998	0.512	0.262	230,128	0.00671
Kabupaten Wonogiri	18,818,939.39	954,706	34,317,865	19.712	26.998	-7.286	53.089	50,684,611	1.47692
Kabupaten Karanganyar	23,731,952.05	871,596	34,317,865	27.228	26.998	0.230	0.053	46,170	0.00135
Kabupaten Sragen	23,977,207.30	885,122	34,317,865	27.089	26.998	0.091	0.008	7,355	0.00021
Kabupaten Grobogan	17,659,254.29	1,365,207	34,317,865	12.935	26.998	-14.063	197.762	269,985,729	7.86721
Kabupaten Blora	16,866,640.78	858,865	34,317,865	19.638	26.998	-7.360	54.165	46,520,695	1.35558
Kabupaten Rembang	12,220,172.17	628,922	34,317,865	19.430	26.998	-7.568	57.269	36,017,976	1.04954

Kabupaten/Kota	PDRB	f_i	N	y_i	y	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2 * f_i$	$(y_i - y)^2 * f_i / N$
		Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Kabupaten Pati	27,612,445.94	1,246,691	34,317,865	22.149	26.998	-4.849	23.517	29,318,173	0.85431
Kabupaten Kudus	68,821,162.19	851,478	34,317,865	80.826	26.998	53.828	2,897.403	2,467,075,067	71.88894
Kabupaten Jepara	19,055,335.81	1,223,198	34,317,865	15.578	26.998	-11.420	130.410	159,516,918	4.64822
Kabupaten Demak	16,584,124.32	1,140,675	34,317,865	14.539	26.998	-12.459	155.230	177,066,920	5.15961
Kabupaten Semarang	32,002,984.99	1,027,489	34,317,865	31.147	26.998	4.149	17.212	17,685,619	0.51535
Kabupaten Temanggung	13,776,254.81	759,128	34,317,865	18.147	26.998	-8.851	78.332	59,463,885	1.73274
Kabupaten Kendal	27,649,777.07	957,024	34,317,865	28.891	26.998	1.893	3.585	3,430,949	0.09998
Kabupaten Batang	13,667,079.80	756,079	34,317,865	18.076	26.998	-8.922	79.597	60,181,970	1.75366
Kabupaten Pekalongan	14,679,128.72	886,197	34,317,865	16.564	26.998	-10.434	108.865	96,475,438	2.81123
Kabupaten Pemalang	16,336,984.00	1,296,281	34,317,865	12.603	26.998	-14.395	207.217	268,611,504	7.82716
Kabupaten Tegal	22,322,100.13	1,433,515	34,317,865	15.572	26.998	-11.426	130.563	187,163,974	5.45384
Kabupaten Brebes	29,509,206.81	1,796,004	34,317,865	16.430	26.998	-10.568	111.672	200,564,240	5.84431
Kota Magelang	5,820,532.00	121,474	34,317,865	47.916	26.998	20.918	437.557	53,151,817	1.54881
Kota Surakarta	31,685,480.46	516,102	34,317,865	61.394	26.998	34.396	1,183.073	610,586,542	17.79209
Kota Salatiga	8,624,240.98	188,928	34,317,865	45.648	26.998	18.650	347.833	65,715,485	1.91491
Kota Semarang	123,279,891.91	1,757,686	34,317,865	70.138	26.998	43.140	1,861.026	3,271,098,978	95.31767
Kota Pekalongan	6,706,278.70	301,870	34,317,865	22.216	26.998	-4.782	22.870	6,903,643	0.20117
Kota Tegal	10,006,943.00	248,094	34,317,865	40.335	26.998	13.337	177.883	44,131,769	1.28597
Jumlah	25,535,053.77	34,317,865		26.998					299.84
									17.316
								IW	0.641

Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Kabupaten/Kota	PDRB	f_i	N	y_i	y	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2 * f_i$	$(y_i - y)^2 * f_i / N$
		Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Kabupaten Cilacap	98,159,047.56	1,719,504	34,490,835	57.0857	28.286	28.800	829.4213	1,426,193,270	41.350
Kabupaten Banyumas	37,414,500.58	1,679,124	34,490,835	22.2822	28.286	-6.004	36.0462	60,525,971	1.755
Kabupaten Purbalingga	16,458,708.49	925,193	34,490,835	17.7895	28.286	-10.497	110.1768	101,934,798	2.955
Kabupaten Banjarnegara	14,438,149.74	918,219	34,490,835	15.7241	28.286	-12.562	157.8018	144,896,624	4.201
Kabupaten Kebumen	18,777,048.50	1,195,092	34,490,835	15.7118	28.286	-12.574	158.1105	188,956,550	5.478
Kabupaten Purworejo	12,670,378.05	716,477	34,490,835	17.6843	28.286	-10.602	112.3965	80,529,522	2.335
Kabupaten Wonosobo	13,065,841.65	787,384	34,490,835	16.5940	28.286	-11.692	136.7031	107,637,845	3.121
Kabupaten Magelang	22,082,795.90	1,279,625	34,490,835	17.2572	28.286	-11.029	121.6335	155,645,324	4.513
Kabupaten Boyolali	21,406,268.93	979,799	34,490,835	21.8476	28.286	-6.438	41.4528	40,615,444	1.178
Kabupaten Klaten	26,360,649.93	1,171,411	34,490,835	22.5033	28.286	-5.783	33.4393	39,171,113	1.136
Kabupaten Sukoharjo	25,564,065.09	885,205	34,490,835	28.8793	28.286	0.593	0.3520	311,554	0.009
Kabupaten Wonogiri	19,837,022.48	957,106	34,490,835	20.7260	28.286	-7.560	57.1529	54,701,395	1.586
Kabupaten Karanganyar	25,150,277.73	879,078	34,490,835	28.6098	28.286	0.324	0.1049	92,189	0.003
Kabupaten Sragen	25,356,459.51	887,889	34,490,835	28.5581	28.286	0.272	0.0741	65,758	0.002
Kabupaten Grobogan	18,688,567.37	1,371,610	34,490,835	13.6253	28.286	-14.661	214.9368	294,809,428	8.547
Kabupaten Blora	17,609,716.06	862,110	34,490,835	20.4263	28.286	-7.860	61.7749	53,256,768	1.544
Kabupaten Rembang	12,939,882.29	633,584	34,490,835	20.4233	28.286	-7.863	61.8219	39,169,365	1.136
Kabupaten Pati	29,192,479.34	1,253,299	34,490,835	23.2925	28.286	-4.993	24.9349	31,250,940	0.906
Kabupaten Kudus	71,048,973.31	861,430	34,490,835	82.4779	28.286	54.192	2,936.7665	2,529,818,804	73.348
Kabupaten Jepara	20,170,255.17	1,240,600	34,490,835	16.2585	28.286	-12.028	144.6615	179,467,095	5.203

Kabupaten/Kota	PDRB	f_i	N	y_i	y	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2 * f_i$	$(y_i - y)^2 * f_i / N$
		Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Kabupaten Demak	17,479,877.38	1,151,796	34,490,835	15.1762	28.286	-13.110	171.8671	197,955,795	5.739
Kabupaten Semarang	33,855,679.34	1,040,629	34,490,835	32.5339	28.286	4.248	18.0443	18,777,447	0.544
Kabupaten Temanggung	14,483,255.21	765,594	34,490,835	18.9177	28.286	-9.368	87.7656	67,192,812	1.948
Kabupaten Kendal	29,245,664.52	964,106	34,490,835	30.3345	28.286	2.048	4.1963	4,045,692	0.117
Kabupaten Batang	14,448,625.80	762,377	34,490,835	18.9521	28.286	-9.334	87.1222	66,419,933	1.926
Kabupaten Pekalongan	15,525,050.94	891,892	34,490,835	17.4069	28.286	-10.879	118.3554	105,560,235	3.061
Kabupaten Pemalang	17,268,888.82	1,299,724	34,490,835	13.2866	28.286	-14.999	224.9826	292,415,228	8.478
Kabupaten Tegal	23,552,548.37	1,437,225	34,490,835	16.3875	28.286	-11.898	141.5739	203,473,563	5.899
Kabupaten Brebes	31,050,889.67	1,802,829	34,490,835	17.2234	28.286	-11.063	122.3806	220,631,242	6.397
Kota Magelang	6,138,622.75	121,872	34,490,835	50.3694	28.286	22.083	487.6777	59,434,260	1.723
Kota Surakarta	33,506,222.09	517,887	34,490,835	64.6979	28.286	36.412	1,325.8294	686,629,800	19.908
Kota Salatiga	9,127,749.57	191,571	34,490,835	47.6468	28.286	19.361	374.8415	71,808,756	2.082
Kota Semarang	131,317,631.74	1,786,114	34,490,835	73.5214	28.286	45.235	2,046.2429	3,654,823,141	105.965
Kota Pekalongan	7,087,915.58	304,477	34,490,835	23.2790	28.286	-5.007	25.0702	7,633,298	0.221
Kota Tegal	10,594,340.17	249,003	34,490,835	42.5470	28.286	14.261	203.3772	50,641,536	1.468
Jumlah	26,887,829.99	34,490,835		28.2868					325.782
									18.049
								IW	0.638

Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/Kota	PDRB	f_i	N	y_i	y	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2 * f_i$	$(y_i - y)^2 * f_i / N$
		Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Kabupaten Cilacap	100,445,727.17	1,727,098	34,718,204	58.159	29.576	28.5824	816.956	1,410,963,719.310	40.640
Kabupaten Banyumas	39,779,320.86	1,693,006	34,718,204	23.496	29.576	-6.0800	36.966	62,583,451.939	1.803
Kabupaten Purbalingga	17,387,941.84	933,989	34,718,204	18.617	29.576	-10.9594	120.108	112,179,244.436	3.231
Kabupaten Banjarnegara	15,246,865.66	923,192	34,718,204	16.515	29.576	-13.0608	170.586	157,483,328.768	4.536
Kabupaten Kebumen	19,825,062.62	1,197,982	34,718,204	16.549	29.576	-13.0275	169.716	203,316,701.458	5.856
Kabupaten Purworejo	13,360,774.12	718,316	34,718,204	18.600	29.576	-10.9761	120.475	86,538,790.990	2.493
Kabupaten Wonosobo	13,798,836.28	790,504	34,718,204	17.456	29.576	-12.1205	146.906	116,129,787.115	3.345
Kabupaten Magelang	23,253,154.32	1,290,591	34,718,204	18.017	29.576	-11.5588	133.605	172,429,842.944	4.967
Kabupaten Boyolali	22,681,097.81	984,807	34,718,204	23.031	29.576	-6.5452	42.840	42,188,986.706	1.215
Kabupaten Klaten	27,829,653.91	1,174,986	34,718,204	23.685	29.576	-5.8911	34.705	40,778,372.319	1.175
Kabupaten Sukoharjo	27,076,442.63	891,912	34,718,204	30.358	29.576	0.7815	0.611	544,766.436	0.016
Kabupaten Wonogiri	20,856,209.49	959,492	34,718,204	21.737	29.576	-7.8395	61.458	58,968,279.756	1.698
Kabupaten Karanganyar	26,641,186.38	886,519	34,718,204	30.051	29.576	0.4752	0.226	200,216.028	0.006
Kabupaten Sragen	26,853,059.12	890,518	34,718,204	30.154	29.576	0.5782	0.334	297,715.865	0.009
Kabupaten Grobogan	19,692,614.79	1,377,788	34,718,204	14.293	29.576	-15.2833	233.579	321,822,830.559	9.270
Kabupaten Blora	18,322,129.66	865,013	34,718,204	21.181	29.576	-8.3949	70.474	60,961,072.488	1.756
Kabupaten Rembang	13,612,548.40	638,188	34,718,204	21.330	29.576	-8.2462	68.000	43,396,944.398	1.250
Kabupaten Pati	30,902,899.34	1,259,590	34,718,204	24.534	29.576	-5.0421	25.423	32,022,651.179	0.922
Kabupaten Kudus	73,249,694.10	871,311	34,718,204	84.068	29.576	54.4921	2,969.394	2,587,265,485.687	74.522
Kabupaten Jepara	21,384,282.93	1,257,912	34,718,204	17.000	29.576	-12.5764	158.166	198,958,693.684	5.731
Kabupaten Demak	18,417,009.99	1,162,805	34,718,204	15.838	29.576	-13.7378	188.727	219,452,557.361	6.321

Kabupaten/Kota	PDRB	f_i	N	y_i	y	$y_i - y$	$(y_i - y)^2$	$(y_i - y)^2 * f_i$	$(y_i - y)^2 * f_i / N$
		Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Kabupaten Semarang	35,747,010.84	1,053,786	34,718,204	33.922	29.576	4.3462	18.890	19,905,750.576	0.573
Kabupaten Temanggung	15,214,058.87	772,018	34,718,204	19.707	29.576	-9.8694	97.404	75,197,744.621	2.166
Kabupaten Kendal	30,908,486.47	971,086	34,718,204	31.829	29.576	2.2526	5.074	4,927,316.184	0.142
Kabupaten Batang	15,226,885.00	768,583	34,718,204	19.812	29.576	-9.7646	95.347	73,282,251.410	2.111
Kabupaten Pekalongan	16,356,350.99	897,711	34,718,204	18.220	29.576	-11.3562	128.962	115,770,956.538	3.335
Kabupaten Pemalang	18,270,189.13	1,302,813	34,718,204	14.024	29.576	-15.5526	241.883	315,127,874.643	9.077
Kabupaten Tegal	24,866,727.91	1,440,698	34,718,204	17.260	29.576	-12.3160	151.685	218,531,666.760	6.294
Kabupaten Brebes	32,869,150.35	1,809,096	34,718,204	18.169	29.576	-11.4074	130.129	235,415,362.169	6.781
Kota Magelang	6,472,539.51	122,111	34,718,204	53.005	29.576	23.4292	548.925	67,029,803.019	1.931
Kota Surakarta	35,443,181.34	519,587	34,718,204	68.214	29.576	38.6379	1,492.889	775,685,563.392	22.342
Kota Salatiga	9,664,500.70	194,084	34,718,204	49.795	29.576	20.2192	408.817	79,344,882.209	2.285
Kota Semarang	140,326,256.85	1,814,110	34,718,204	77.353	29.576	47.7764	2,282.589	4,140,867,614.726	119.271
Kota Pekalongan	7,477,425.04	307,097	34,718,204	24.349	29.576	-5.2275	27.327	8,391,912.902	0.242
Kota Tegal	11,205,322.88	249,905	34,718,204	44.838	29.576	15.2621	232.932	58,210,842.616	1.677
Jumlah	990,664,597.30	34,718,204		29.576					349
									18.681
								IW	0.631

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 5: Realisasi Investasi

A. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kab. Cilacap	395,274.40	4,805,118.20	6,830,889.70
Kab. Banyumas	441,641.70	614,635.30	461,612.50
Kab. Purbalingga	45,765.30	9,103.80	52,876.30
Kab. Banjarnegara	50,645.30	148,609.10	168,026.90
Kab. Kebumen	17,065.00	71,422.60	78,430.30
Kab. Purworejo	13,941.70	113,205.00	18,337.10
Kab. Wonosobo	1,688.50	16,125.30	14,715.00
Kab. Magelang	185,031.70	125,480.30	193,883.80
Kab. Boyolali	474,463.20	1,113,601.20	422,073.60
Kab. Klaten	247,327.20	299,788.50	212,273.40
Kab. Sukoharjo	2,055,377.80	1,107,151.30	921,677.90
Kab. Wonogiri	41,831.90	42,569.20	58,524.90
Kab. Karanganyar	1,957,677.30	989,035.40	261,021.80
Kab. Sragen	999,424.60	2,441,479.00	33,837.40
Kab. Grobogan	247,327.20	215,708.80	393,135.80
Kab. Blora	100,356.00	13,246.20	2,561.80
Kab. Rembang	74,039.00	427,814.80	242,943.50
Kab. Pati	889,755.50	106,167.70	221,462.40
Kab. Kudus	1,034,981.20	687,187.70	2,041,677.30
Kab. Jepara	56,968.00	8,365.10	17,620.70
Kab. Demak	758,548.70	463,882.80	517,438.80
Kab. Semarang	1,339,475.70	2,141,898.60	545,448.30
Kab. Temanggung	165,803.80	93,391.00	7,581.90
Kab. Kendal	4,566.10	311,708.40	135,930.50
Kab. Batang	321,422.80	544,148.60	240,595.50
Kab. Pekalongan	5,907,349.90	1,241,009.10	40,784.40
Kab. Pemalang	2,033.30	103,357.80	51,606.50
Kab. Tegal	404,467.70	59,570.20	40,784.40
Kab. Brebes	62,908.20	67,550.80	44,044.30
Kota Magelang	16,418,900.00	12,966.20	25,080.30
Kota Surakarta	29,262.30	383,298.80	212,674.80
Kota Salatiga	98,595.90	121,931.20	22,520.30
Kota Semarang	1,129,039.20	8,534,747.90	4,048,092.10
Kota Pekalongan	51,256.50	96,123.00	24,335.20
Kota Tegal	34,326.60	13,494.70	34,483.80

B. Realisasi Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (dalam Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kab. Cilacap	3,119.30	9,296.50	16,668.00
Kab. Banyumas	917.6	773.5	175.7
Kab. Purbalingga	1,620.80	12,358.20	204.8
Kab. Banjarnegara	2,000.00	23.1	72
Kab. Kebumen	0	0	0
Kab. Purworejo	0	0	15
Kab. Wonosobo	0	1.5	0.3
Kab. Magelang	261.3	2,733.00	43.6
Kab. Boyolali	18,538.10	15,263.20	8,209.30
Kab. Klaten	6,372.70	3,091.40	3,212.20
Kab. Sukoharjo	160,729.00	53,681.80	4,861.00
Kab. Wonogiri	6,063.40	121.7	1,101.80
Kab. Karanganyar	3,478.90	7,522.30	13,751.80
Kab. Sragen	3,051.50	5,105.90	1,759.20
Kab. Grobogan	7,731.60	42,752.30	20,613.80
Kab. Blora	14.8	4,234.90	207
Kab. Rembang	741.6	16,643.30	8,678.70
Kab. Pati	5,407.20	163.6	6,053.30
Kab. Kudus	0	114	849
Kab. Jepara	124,256.10	915,787.30	1,434,375.30
Kab. Demak	17,738.30	21,462.00	8,655.60
Kab. Semarang	28,988.00	18,850.20	23,384.20
Kab. Temanggung	6,406.80	9,093.40	195.7
Kab. Kendal	50,722.10	60,484.90	18,726.60
Kab. Batang	411,211.00	1,009,895.10	964,463.20
Kab. Pekalongan	7.4	0	0
Kab. Pemasang	1,496.80	1,152.10	2,237.20
Kab. Tegal	2,239.40	13,391.80	13,582.30
Kab. Brebes	18,133.20	91,202.50	29,764.30
Kota Magelang	57.3	58.2	692.5
Kota Surakarta	10,949.90	89.4	632.9
Kota Salatiga	36,709.30	9,679.30	15,501.80
Kota Semarang	101,726.90	46,011.60	122,124.00
Kota Pekalongan	0	597	9.1
Kota Tegal	105.6	1,068.30	2,435.00

**Lampiran 6: Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kab. Cilacap	68.9	69.56	69.98
Kab. Banyumas	70.75	71.3	71.96
Kab. Purbalingga	67.72	68.41	68.99
Kab. Banjarnegara	65.86	66.54	67.34
Kab. Kebumen	68.29	68.8	69.6
Kab. Purworejo	71.31	71.87	72.5
Kab. Wonosobo	66.89	67.81	68.27
Kab. Magelang	68.39	69.11	69.87
Kab. Boyolali	72.64	73.22	73.8
Kab. Klaten	74.25	74.79	75.29
Kab. Sukoharjo	75.56	76.07	76.84
Kab. Wonogiri	68.66	69.37	69.98
Kab. Karanganyar	75.22	75.54	75.89
Kab. Sragen	72.4	72.96	73.43
Kab. Grobogan	68.87	69.32	69.86
Kab. Blora	67.52	67.95	68.65
Kab. Rembang	68.95	69.46	70.15
Kab. Pati	70.12	70.71	71.35
Kab. Kudus	73.84	74.58	74.94
Kab. Jepara	70.79	71.38	71.88
Kab. Demak	70.41	71.26	71.87
Kab. Semarang	73.2	73.61	74.14
Kab. Temanggung	68.34	68.83	69.56
Kab. Kendal	70.62	71.28	71.97
Kab. Batang	67.35	67.86	68.42
Kab. Pekalongan	68.4	68.97	69.71
Kab. Pemasang	65.04	65.67	66.32
Kab. Tegal	66.44	67.33	68.24
Kab. Brebes	64.86	65.68	66.12
Kota Magelang	77.84	78.31	78.8
Kota Surakarta	80.85	81.46	81.86
Kota Salatiga	81.68	82.41	83.12
Kota Semarang	82.01	82.72	83.19
Kota Pekalongan	73.77	74.24	74.77
Kota Tegal	73.95	74.44	74.93

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Unik Lestari
NIM : 1717201044
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Oktober 1999
Alamat Rumah : Dukuhwaluh RT 3 RW 6 Kec. Kembaran Kab.
Banyumas
Email : unikles17@gmail.com
Nama Ayah : Dirsan
Nama Ibu : Karsitem

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Pertiwi II Dukuhwaluh, 2005
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 4 Dukuhwaluh, 2011
3. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kembaran, 2014
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Baturraden, 2017
5. S.1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN Purwokerto (2019-2020)
2. Young On Top (YOT) Purwokerto (2017-2018)
3. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Jawa Tengah (2019-2020)

Purwokerto, 1 Juni 2021



Unik Lestari